



KUMPULAN *POLICY BRIEF*

ANALISIS KESELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI
BERBASIS KEWILAYAHAN

DAFTAR ISI

Daftar isi	ii
Penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	1
Penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi di Wilayah KEK Pulau Morotai	10
Penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi di KEK Morowali	18
Penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja di Provinsi Bali: Sektor Ekonomi Kreatif	26
Penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja di Provinsi Kaltim: Wilayah Ibu Kota Nusantara	38
Penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja di Provinsi Jawa Tengah: Sektor Industri Kendal	49
Penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja di Provinsi Kepulauan Riau	58
Analisis Keselarasan Pendidikan Tinggi Vokasi Terhadap Potensi Wilayah di Provinsi Bali (KEK Sanur Dan KEK Kura-Kura)	65
Analisis Keselarasan Pendidikan Vokasi terhadap Potensi Ekonomi di Derah Wilayah IKN	71
Analisis Keselarasan Pendidikan Vokasi terhadap Potensi Ekonomi di Kabupaten Batang	80
Analisis Keselarasan Pendidikan Vokasi terhadap Potensi Ekonomi di Kabupaten Morowali	86
Analisis Keselarasan Pendidikan Vokasi terhadap Potensi Ekonomi Kabupaten Kendal	92
Analisis Keselarasan Pendidikan Tinggi Vokasi terhadap Potensi Wilayah di Kabupaten Pulau Morotai	98



**PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU
BATANG (KITB)**

PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (KITB)

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Sri Hartono

Ketua Tim *Tracer Study* Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., MT

Guru besar Jurusan Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.

Guru Besar Jurusan Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Yogyakarta

Eka Ary Wibawa, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Khusni Syauqi, M.Pd

Lektor Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Arum Darmawati, M.M

Lektor Jurusan Manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta

Yolanda Septiana, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta

Kartianom, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Kimia di Institut Agama Islam Negeri Bone

Andi Harpeni Dewantara, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Negeri Bone

Rahmat Darmawan, S.Pd.

Dosen Jurusan Usaha Perjalanan Wisata di Universitas Negeri Jakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan salah satu kawasan industri yang sedang berkembang pesat di Indonesia, terutama di sektor garmen dan tekstil. Untuk mendukung pertumbuhan ini, sangat penting bagi Satuan Pendidikan Vokasi (SPV) di kawasan ini dan sekitarnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri setempat. Penyelarasan antara SPV dan dunia kerja menjadi krusial karena ketidaksesuaian bisa menyebabkan lulusan yang tidak siap kerja dan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Akibatnya, terjadi kesenjangan

antara *demand* dan *supply* tenaga kerja, yang dapat meningkatkan angka pengangguran. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keselarasan antara SPV dan industri di wilayah KITB. Hasil kajian menunjukkan bahwa keselarasan SPV industri mitra berdasarkan enam dimensi (kurikulum, pembelajaran, pendidikan dan tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, serta kemitraan) berada pada kategori cukup selaras. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi berbagai masalah esensial di SPV dan industri, serta memberikan rekomendasi kepada SPV, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan industri. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan penyelarasan pendidikan vokasi agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.

Kata kunci: Dunia Kerja, Keselarasan, Satuan Pendidikan Vokasi, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)

PENDAHULUAN

Keselarasan pendidikan vokasi di Indonesia menjadi sangat krusial, terutama sejak diberlakukannya Permendikbud Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelarasan Pendidikan Vokasi. Satuan Pendidikan Vokasi (SPV), seperti Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan

(LKP) memiliki peran vital dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil, terlatih, dan siap untuk masuk ke dunia kerja (Chen & Pastore, 2024; Okolie et al., 2020). SPV juga memiliki kecenderungan untuk secara langsung mencerminkan fluktuasi ekonomi (Chen & Pastore, 2024), yang artinya SPV berperan penting dalam menyediakan tenaga kerja berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan vokasi harus terus beradaptasi dengan perubahan global yang cepat dan dinamis, termasuk perkembangan teknologi, kebutuhan pasar kerja yang berkembang, dan fluktuasi ekonomi global. Hal ini menekankan perlunya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pendidikan vokasi untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri. Namun, banyak program pendidikan vokasi belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri secara cepat yang mengakibatkan lulusan sering kali tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Untuk meningkatkan keselarasan antara SPV dengan dunia kerja, diperlukan analisis yang mengarah pada keselarasan berbasis industri atau keunggulan wilayah. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi peluang serta kebutuhan khusus dalam industri dan sektor unggulan di wilayah tertentu.

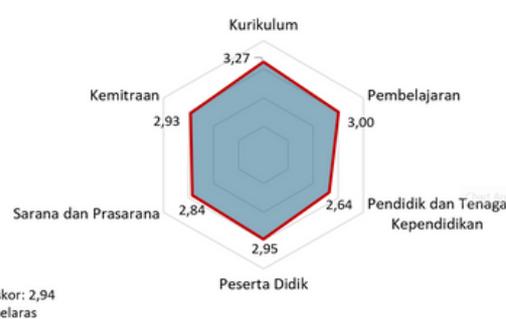
Dalam kajian ini, analisis keselarasan pendidikan vokasi dilakukan di KITB Jawa Tengah. Sektor unggulan di KITB adalah garmen dan tekstil. Idealnya, satuan pendidikan vokasi di wilayah ini dan sekitarnya mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan keunggulan wilayah setempat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi berbasis industri atau keunggulan wilayah di KITB. Hasil dari kajian ini akan memberikan rekomendasi bagi satuan pendidikan vokasi, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan industri agar berkontribusi dalam penyelarasan satuan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.

DESKRIPSI MASALAH

Data kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi, observasi, dan *focus group discussion*. Hasil analisis data menunjukkan temuan menarik terkait analisis keselarasan satuan pendidikan vokasi di KITB.

a. Tingkat keselarasan SPV dengan industri mitra

Tingkat keselarasan SPV dengan industri mitra diukur melalui enam dimensi yaitu kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, dan kemitraan. Secara rata-rata, enam dimensi tersebut mendapatkan hasil cukup selaras dengan skor 2,94 dalam skala 4 seperti yang divisualisasikan pada Gambar 1. Meskipun demikian, tetap terdapat permasalahan atau bagian lemah yang membutuhkan peningkatan. Secara lebih lanjut Tabel 1 menampilkan rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh SPV beserta dengan industri mitra mereka.



GAMBAR 1. Tingkat Keselarasan Satuan Pendidikan Vokasi KITB

TABEL 1. Permasalahan terkini untuk aspek tingkat keselarasan SPV dengan industri mitra di KITB

No	Dimensi	Masalah
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar SPV, baik di tingkat SMK, LKP, maupun PTV, telah melakukan kegiatan peninjauan, pemetaan struktur, dan evaluasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri setempat.
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Di tingkat SMK dan PTV, perangkat pembelajaran, model pembelajaran, penerapan K3 dan budaya kerja dalam pembelajaran praktik, serta asesmen pembelajaran berbasis tugas/proyek telah selaras dengan kebutuhan, standar, dan kasus riil yang ada di industri, sedangkan di tingkat LKP belum sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan, standar, dan kasus riil yang ada di industri Tantangan bidang pembelajaran adalah dalam bidang penyaluran ke tempat PKL atau ke tempat kerja. Hal tersebut karena siswa kebanyakan perempuan dan industri ada yang mensyaratkan harus laki-laki
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Di semua tingkatan SPV (SMK, PTV, dan LKP), jumlah teknisi dan laboran masih sangat terbatas. Di tingkat PTV, ada kendala terkait jumlah pendidik/dosen yang minim di satu bidang kompetensi keahlian
4	Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> Kendala utama yang dihadapi SPV terkait rendahnya keterserapan lulusan di industri yang relevan dengan keahlian adalah spesifikasi yang dibutuhkan industri berbeda dengan spesifikasi lulusan.

No	Dimensi	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Tantangan lain yang dihadapi oleh SPV adalah masalah daya juang siswa/mahasiswa. Ditemukan banyak dari mereka yang enggan bekerja keluar kota dan jauh dari rumah. Sebagian besar SPV mengklaim tidak mengetahui informasi terkait lowongan kerja atau jabatan kerja apa saja yang dibutuhkan di KITB.
5	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana SPV di tingkat SMK dan PTV di Batang-Pekalongan mayoritas telah tersedia. Namun, kendala utama yang dihadapi sebagian besar SPV adalah terkait kemutakhiran sarana tersebut. Sarana dan prasarana SPV di tingkat LKP masih belum sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran/dana yang sebagian besar swadaya
6	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Kemitraan SPV (PTV, SMK, dan LKP) beserta industri mitra hanya sebatas pada tahap perencanaan dan implementasi/pelaksanaan. Tahapan monitoring dan evaluasi serta perekrutan alumni belum terlaksana dengan baik.

b. Masalah pada kebutuhan dan kualifikasi kerja

Sektor unggulan di KITB saat ini yakni industri garmen. Industri garmen berfokus pada aktivitas produksi pakaian jadi yang diproduksi secara masal. Salah satu industri garmen yang menyerap tenaga kerja secara besar adalah industri PT. Batang Apparel Indonesia (PT BAI). Perusahaan ini

bergerak di bidang ekspor pakaian jadi ke pasar uni eropa. PT BAI mampu menyerap 2.000 tenaga kerja lebih yang mayoritas didominasi oleh perempuan. Perusahaan ini termasuk dalam industri padat karya yang secara umum jenis pekerjaannya adalah menjahit pakaian. Kebutuhan jabatan kerja di Kabupaten batang didominasi oleh industri garmen

dari PT. BAI dan industri alas kaki dari PT Yihquan Footware Indonesia. Lokasi pabrik PT Yihquan Footware Indonesia berada di dalam KITB. Selanjutnya proyeksi industri yang akan berkembang di dalam KITB yaitu pada sektor alat kesehatan dan sektor *renewable technology*. Sektor-sektor lain di luar KITB juga

berperan penting dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Batang seperti pada sektor industri listrik, industri *konstruksi, dna snack and bakery*. Kebutuhan jabatan dan kualifikasi kerja sektor unggulan di Kabupaten Batang diataranya seperti terlihat pada Tabel 2.

TABEL 2. Kebutuhan Jabatan dan Kualifikasi Kerja Sektor Unggulan di KITB

Sektor	Jabatan Kerja	Kualifikasi
Industri Garmen	<ul style="list-style-type: none"> Operator Jahit 	<ul style="list-style-type: none"> SMP/SMA/SMK Semua jurusan Memiliki pengalaman
Industri Tekstil	<ul style="list-style-type: none"> Operator Produksi <i>Quality control</i> Supervisor 	<ul style="list-style-type: none"> Operator: Minimal SMK QC dan Supervisor: D3 Teknik
Industri Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <i>Heavy Equipment Junior Operator</i> <i>Local Operator</i> 	<ul style="list-style-type: none"> SMK D3 Teknik (Listrik, Kimia, Mesin)
<i>Biotechnology, animal feed & livestock</i>	<ul style="list-style-type: none"> Staff keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> D3 Akuntansi
<i>Snack and Bakery</i>	<ul style="list-style-type: none"> Operator produksi Pengolahan pangan Pengawas kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal SMA/SMK/Sederajat Diutamakan jurusan relevan: Teknik Pengolahan Pangan, Tata Boga
Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Teknisi/Operator Perencanaan wilayah dan kota 	<ul style="list-style-type: none"> SMK D3 Perencanaan Wilayah dan Kota

c. Masalah hard skill dan soft skill lulusan

Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan vokasi masih dinilai kurang oleh industri mitra. Kompetensi ini dapat mencakup *hardskill* dan *softskill* lulusan. *Hardskill* yang dimaksud mengarah kepada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai bidang yang mereka tekuni. Contoh saja pada industri konstruksi, mereka menyampaikan jika tidak sepenuhnya percaya dengan lulusan SMK dapat bekerja langsung. Atas dasar tersebut rata-rata dari industri ini akan memberikan pelatihan berupa magang atau training. Tentu hal tersebut menjadi suatu fakta yang tidak baik mengingat tujuan awal dibentuknya pendidikan vokasi adalah mempersiapkan pekerja yang terampil dan berkompoten. Selanjutnya *softskill*, mayoritas industri mengeluhkan terkait kurangnya *softskill* lulusan pendidikan vokasi saat ini. *Softskill* yang dimaksud antara lain seperti kedisiplinan, tanggung jawab terhadap *jobdesc*, *teamwork*, etika bekerja, integritas, dan daya juang. Dari beberapa *soft skill* tersebut, etika bekerja menjadi sorotan utama pada masalah ini. Generasi Z dinilai generasi yang memiliki etika buruk dan memiliki daya juang yang sangat rendah.

d. Masalah kesesuaian materi ajar dengan kebutuhan industri

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara materi yang diajarkan di SPV dengan materi sesuai kebutuhan

industri. Pada sektor industri garmen dan tekstil beberapa materi yang dibutuhkan industri seperti pengoperasian mesin jahit, perbaikan komponen mesin, dan bahasa asing (inggris, mandarin, dan korea). Pada sektor industri konstruksi membutuhkan materi tentang teknik pengelasan, fabrikasi logam, dan perencanaan wilayah dan kota.

e. Masalah sertifikasi kompetensi

Kebutuhan sertifikat kompetensi di kawasan Industri Batang bervariasi sesuai dengan karakteristik industrinya. Beberapa industri mengemukakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan akan lebih diutamakan dalam perekrutan pekerja. Industri garmen merupakan industri padat karya dan membutuhkan sertifikat kompetensi Tukang Jahit dan Operator Mesin Jahit. Selain itu, industri garmen sangat membutuhkan Sertifikat Ahli K3 Umum dan Sertifikat Ahli K3 Kebakaran karena keahlian ini masih jarang sekali di wilayah Batang. Industri di bidang bakery membutuhkan sertifikat kompetensi *commis pastry* dan sertifikat kompetensi baker. Selanjutnya industri di bidang listrik seperti PT. Bhimasena Power Indonesia membutuhkan sertifikat kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

REKOMENDASI

a. Peningkatan kualitas sarana prasarana

Kualitas sarana dan prasarana SPV di wilayah KITB perlu ditingkatkan kualitasnya agar sesuai dengan standar dunia industri. Saat FGD industri sering kali menyebut kualitas sarana prasarana yang ada di SMK, PTV, dan LKP berbeda jauh spesifikasinya dengan yang ada di industri. SPV perlu melakukan peremajaan sarana dan prasarana terutama yang mendukung pembelajaran praktik. SPV perlu rajin mengusulkan proposal hibah atau program peningkatan kualitas sarana prasarana dari pemerintah maupun swasta agar dapat memenuhi standar industri. Dengan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pembelajaran maka dapat meningkatkan kompetensi lulusan agar selaras dengan kebutuhan industri.

b. Peningkatan kerja sama dengan industri

Peningkatan kerja sama antara SPV dengan industri dapat dilakukan dengan membentuk forum kemitraan. Forum ini dapat menjadi wadah untuk merespon kebutuhan kompetensi dan materi ajar yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, kolaborasi lebih lanjut dapat dilakukan dalam menyediakan program magang dan praktik kerja lapangan yang sesuai dengan standar industri. Dukungan dari industri dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi yang dibutuhkan juga menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas lulusan. Selain itu, perlu ditingkatkan fasilitas dan infrastruktur SPV dengan partisipasi aktif dari industri, terutama pada tingkat LKP yang menghadapi keterbatasan anggaran. Langkah-langkah ini perlu didukung dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkala untuk memastikan efektivitas kerja sama tersebut dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tuntutan industri di KITB.

c. Peningkatan kapasitas SDM

Upaya penyelarasan kompetensi lulusan SPV di wilayah KITB juga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM pendidikan vokasi. Tenaga pendidik SPV (guru, dosen, dan instruktur) perlu diberikan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan mengikuti program *upskilling* dan *reskilling*. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan dengan pelaksanaan magang industri bagi guru/dosen/instruktur, workshop, sertifikasi kompetensi, dan lokakarya. Upaya peningkatan kualitas SDM seyogyanya dilakukan secara kontinyu agar selalu selaras dengan perkembangan dunia industri

REFERENSI

- Chen, J., & Pastore, F. (2024). *Dynamics of returns to vocational education in China: 2010–2017*. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02616-2>
- Okolie, U. C., Nwajiuba, C. A., Binuomote, M. O., Osuji, C. U., Onajite, G. O., & Igwe, P. A. (2020). *How careers advice and guidance can facilitate career development in technical, vocational education, and training graduates: The case in Nigeria*. *Australian Journal of Career Development*, 29(2), 97–106. <https://doi.org/10.1177/1038416220916814>



**PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DI WILAYAH KEK PULAU MOROTAI**

PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DI WILAYAH KEK PULAU MOROTAI

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Sutanti

Ketua Tim Penyelarasan Kompetensi Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., MT

Guru besar Jurusan Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.

Guru Besar Jurusan Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Yogyakarta

Eka Ary Wibawa, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Khusni Syauqi, M.Pd

Lektor Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Arum Darmawati, M.M

Lektor Jurusan Manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta

Yolanda Septiana, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta

Kartianom, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Kimia di Institut Agama Islam Negeri Bone

Andi Harpeni Dewantara, M.Pd.

Lektor Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Negeri Bone

Rahmat Darmawan, S.Pd.

Dosen Jurusan Usaha Perjalanan Wisata di Universitas Negeri Jakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp 30,44T dan menyerap 30.000 tenaga kerja hingga tahun 2025. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam mempersiapkan fasilitas, infrastruktur, serta pembelajaran yang berkualitas guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif. Oleh karena itu, penyelarasan antara satuan pendidikan vokasi (SPV) dan kebutuhan dunia kerja menjadi sangat krusial. Tidak selarasnya SPV dapat berdampak pada lulusan yang tidak siap kerja,

karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, akan terbentuk gap antara demand dan supply, hingga berakibat pada meningkatnya angka pengangguran. Kajian di wilayah KEK Morotai telah dilakukan untuk melihat relevansi SPV saat ini. Tingkat keselarasan SPV dengan industri mitra diukur berdasarkan enam aspek: kurikulum, pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, serta kemitraan. Secara keseluruhan, tingkat keselarasan SPV dengan industri mitra termasuk dalam kategori "Cukup Selaras". Kajian ini juga mengungkap masalah-masalah esensial yang ada di SPV dan dunia kerja, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret. Direktorat pendidikan vokasi sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat menggunakan hasil kajian ini untuk merancang strategi guna meningkatkan keselarasan SPV dan Dunia kerja serta untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi SPV saat ini maupun di masa depan.

Kata kunci: Dunia Kerja, Keselarasan, Satuan Pendidikan Vokasi, Morotai

PENDAHULUAN

Keselarasan pendidikan vokasi di Indonesia menjadi hal yang krusial, terutama setelah terbitnya Permendikbud Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelarasan Pendidikan Vokasi. SPV, baik

Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), memainkan peran vital dalam menyuplai tenaga kerja yang terampil, terlatih, siap memasuki dunia kerja (Chen & Pastore, 2024; Okolie et al., 2020). Selain itu, SPV juga memiliki kecenderungan untuk mencerminkan fluktuasi ekonomi secara dekat (Chen & Pastore, 2024). Dengan kata lain, SPV berperan penting melalui penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan pada akhirnya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, pendidikan vokasi saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya berupa persepsi negatif masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri. Akibatnya, lulusan sering kali tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

Untuk meningkatkan relevansi kompetensi lulusan SPV dengan dunia industri dan mendukung pertumbuhan sektor SPV secara efektif, maka diperlukan analisis keselarasan pendidikan vokasi berbasis industri/ keunggulan wilayah. Analisis keselarasan dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan kebutuhan spesifik industri lokal serta diharapkan

menjadi dasar dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan inovasi di wilayah tertentu. Dengan demikian, program pendidikan vokasi dapat difokuskan pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri-industri unggulan di wilayah tersebut, sehingga lulusan dapat tetap eksis dan adaptif dalam persaingan dunia kerja yang kompetitif.

Dalam kajian ini, analisis keselarasan pendidikan vokasi dilakukan pada level mezo di KEK Morotai di Provinsi Maluku Utara. Sektor keunggulan wilayah di Kabupaten Morowali yaitu pariwisata. Idealnya, satuan pendidikan vokasi di wilayah ini mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai keunggulan wilayah sekitar. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi berbasis industri atau keunggulan wilayah di Kabupaten Morowali. Hasil dari kajian ini berupa rekomendasi bagi satuan pendidikan vokasi, pemerintah daerah, kementerian/ lembaga terkait, dan industri agar berkontribusi dalam penyelarasan satuan pendidikan vokasi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.

DESKRIPSI MASALAH

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan menghasilkan beberapa temuan menarik terkait permasalahan pada SPV di wilayah KEK Morotai. Temuan ini kemudian

diorganisasikan dalam empat aspek berikut.

a. Tingkat keselarasan SPV dengan industri mitra

Bagian ini mengkaji enam dimensi penyelarasan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, dan kemitraan.



GAMBAR 1. Tingkat Keselarasan Satuan Pendidikan Vokasi Kabupaten Pulau Morotai

Secara keseluruhan, rata-rata keenam dimensi tersebut jika dilihat dari analisis keselarasan mendapatkan hasil cukup selaras dengan skor 2,31 dalam skala 4 seperti yang visualisasikan pada Gambar 1. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan atau area kelemahan yang membutuhkan perbaikan/peningkatan. Tabel 1 menampilkan rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh SPV beserta dengan industri mitra.

TABEL 1. Temuan masalah terkait keselarasan SPV dengan Industri Mitra di wilayah KEK Morotai

No	Dimensi	Masalah
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> Hanya beberapa SPV yang mengkonfirmasi keterlibatan industri dalam penyusunan, peninjauan, monitoring, dan evaluasi kurikulum
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Program PKL di beberapa SPV tingkat SMK belum dapat dilaksanakan secara optimal, lokasi industri yang terlalu jauh menjadi kendala Pelibatan industri sebagai dosen/guru praktisi di beberapa SPV belum dapat dilaksanakan secara optimal, lokasi industri yang terlalu jauh dan kecocokan waktu menjadi kendala
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Pendidik dan tenaga kependidikan di SMK wilayah KEK Morotai belum mencukupi, terutama yang sesuai dengan konsentrasi keahlian tertentu
4	Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar lulusan SPV di wilayah KEK Morotai bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya Wilayah KEK Morotai belum mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga sebagian besar lulusan SPV di wilayah tersebut memutuskan bekerja di luar daerah
5	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana yang tersedia di SPV cukup memadai, namun kurang mutakhir dan kurang sesuai dengan kebutuhan industri Pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki LKP di wilayah KEK Morotai dilakukan secara mandiri, sehingga sangat terbatas dan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah

No	Dimensi	Masalah
6	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Kemitraan SPV dengan industri mitra belum sepenuhnya terlaksana secara tuntas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, rekrutmen, serta pengembangan kompetensi dan profesi

b. Masalah pada kebutuhan dan kualifikasi kerja

Sektor unggulan Kabupaten Pulau Morotai adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai telah didukung oleh pemerintah melalui penetapan lokasi ini sebagai KEK pariwisata melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014. KEK Morotai diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp 30,44T dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 30,000 tenaga kerja hingga tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa telah terdapat sektor yang mendukung pengembangan pariwisata di wilayah KEK Morotai seperti perhotelan, agribisnis dan agroteknologi.

Meskipun demikian, suplai tenaga kerja maupun lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada sektor tersebut dinilai masih sangat kurang. Selain itu, hanya sebagian kecil lulusan dari SPV yang bercita-cita untuk berwirausaha di sektor pariwisata seperti biro wisata, penawaran paket wisata, antar jemput bandara/pelabuhan, tour-guide, dan sebagainya. Artinya, sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan di wilayah KEK

Morotai belum sepenuhnya didukung oleh SDM di wilayah tersebut, baik dari sisi kebutuhan dan kualifikasi kerja maupun minat/kesiapan untuk kerja.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa pariwisata di wilayah KEK Morotai masih jauh dari kata maju, apalagi untuk mencapai target penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 hingga tahun 2025 dengan kondisi yang sekarang. Beberapa faktor penyebabnya, yaitu: 1) akses transportasi terbatas, di mana jadwal penerbangan dari Ternate ke Pulau Morotai hanya ada seminggu sekali (hari Rabu), dan sering kali bisa dibatalkan oleh maskapai; 2) biaya perjalanan dan paket wisata tergolong mahal; 3) infrastruktur yang belum memadai; 4) promosi pariwisata yang belum masif; dan 5) minimnya wirausaha di bidang pariwisata dan sektor pendukungnya.

c. Masalah *hard skill* dan *soft skill* lulusan

Salah satu temuan menarik dalam FGD bahwa kompetensi yang dimiliki oleh lulusan vokasi masih dinilai kurang optimal oleh pihak industri, baik *hard skill* maupun *soft skill*,

kemampuan kerja sama, integritas, serta yang paling sering menjadi sorotan terkait etika, resiliensi, dan daya juang.

d. Masalah kesesuaian materi ajar dengan kebutuhan industri

Temuan hasil FGD mengindikasikan bahwa ada permasalahan kesenjangan antara materi yang diajarkan di sekolah dengan materi/kompetensi standar dan kebutuhan industri. Pada dasarnya, materi ajar berdasarkan capaian pembelajaran (CP) dan tujuan pembelajaran (TP) yang ada di SPV diakui dan sangat diperlukan oleh industri. Namun, materi tersebut belum cukup untuk menjadikan peserta didik dianggap 'siap bekerja' setelah lulus. Hal ini disebabkan karena kebutuhan industri yang terus berkembang dan memerlukan keterampilan praktis yang lebih spesifik dan mendalam. Selain itu, adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan di sekolah dan praktik nyata di lapangan turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara SPV dan industri mitra untuk menyusun kurikulum yang lebih relevan dan aplikatif, serta peningkatan program magang atau kerja praktek yang lebih intensif.

e. Masalah sertifikat kompetensi

Masalah lain yang juga mengemuka adalah minimnya kepemilikan sertifikat kompetensi kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas/pihak penyedia sertifikat kompetensi, termasuk oleh SPV itu

sendiri. Selain itu, sertifikat kompetensi di Morotai cenderung belum terlalu dibutuhkan karena mayoritas industri belum mensyaratkan tenaga kerja untuk memilikinya. Meskipun demikian, permasalahan ini tetap perlu menjadi perhatian. Perlu dilakukan pengadaan ujian sertifikasi berkala yang diakui secara resmi, serta penguatan kemitraan dengan industri untuk menyediakan program sertifikasi sebagai upaya memastikan kesesuaian kompetensi lulusan SPV dengan standar industri. Dengan kata lain, penting bagi pihak SPV untuk terus memperbarui kurikulum dan bekerja sama dengan industri untuk menyediakan sertifikasi kompetensi yang relevan dan berkualitas, sebab lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan oleh industri akan lebih diutamakan dalam proses perekrutan. Minimnya kepemilikan sertifikat kompetensi tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi ke depan sebagai perbaikan skema sertifikasi kompetensi yang lebih baik bagi lulusan SPV.

REKOMENDASI

a. Pengembangan kurikulum berbasis industri

SPV perlu melakukan evaluasi kurikulum agar memiliki kesesuaian dengan kebutuhan industri lokal. Untuk itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari pihak industri untuk terlibat secara tuntas, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi. SPV dan industri juga perlu bekerjasama untuk memperbarui kurikulum secara berkala. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan di industri.

b. Peningkatan kerjasama dengan industri dan pemerintah

SPV perlu meningkatkan kerjasama dengan industri-industri yang bergerak di sektor unggulan melalui program magang, praktik kerja, dan kunjungan industri untuk memberikan pengalaman nyata dan meningkatkan kompetensi siswa. Selain dengan industri, SPV juga perlu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah agar dapat menyediakan pelatihan dan sertifikasi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

c. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan

SPV perlu memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan standar industri untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan. Dukungan penuh dari industri dan pemerintah diperlukan untuk bidang pendanaan. Direktorat Pendidikan Vokasi dapat membuat kebijakan kerjasama antara SPV dan industri yang menguntungkan kedua belah pihak. Melalui skema ini, SPV dapat menerima hibah peralatan dan program CSR (*corporate social responsibility*) dari industri, sementara industri mendapatkan lulusan SPV yang siap kerja. Alternatif lain, SPV juga dapat menjalin kemitraan dengan industri melalui program *resource sharing*.

d. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan kurikulum, materi, dan fasilitas penting, namun peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di SPV juga tidak kalah penting. Guru SMK, instruktur LKP, dan dosen politeknik memerlukan peningkatan kemampuan dan kapasitas keilmuan, seperti program *upskilling/reskilling*, atau mengikuti magang di industri dan program sertifikasi. Untuk tenaga kependidikan, SPV perlu menambah teknisi dan laboran melalui skema pengadaan ASN.

e. Pengembangan *hard skills* dan *soft skills* melalui kerjasama dengan industri

Pengembangan *hard skills* dan *soft skills* dapat dilakukan melalui kerjasama dengan industri seperti program magang.

f. Pembentukan tim kemitraan

Perlu dilakukan pembentukan tim khusus untuk mengoptimalkan kemitraan dengan industri, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara SPV dan industri, serta memberikan insentif bagi industri yang aktif terlibat dalam pengembangan SPV.

REFERENSI

- Chen, J., & Pastore, F. (2024). *Dynamics of returns to vocational education in China: 2010–2017*. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02616-2>
- Okolie, U. C., Nwajiuba, C. A., Binuomote, M. O., Osuji, C. U., Onajite, G. O., & Igwe, P. A. (2020). *How careers advice and guidance can facilitate career development in technical, vocational education, and training graduates: The case in Nigeria*. *Australian Journal of Career Development*, 29(2), 97–106. <https://doi.org/10.1177/1038416220916814>



**PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DI KEK MOROWALI**

PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DI KEK MOROWALI

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Devi Istiyaningrum

Ketua Tim Kerja Penyelarasan SDM Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Prof. Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Wagiran, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Bayu Rahmat Setiadi, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Galeh Nur Indriatno Putra Pratama, M. Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Arif Ainur Rafiq, S.T, M.T, M.Sc.

Dosen Jurusan Rekayasa Elektronika dan Mekatronika di Politeknik Negeri Cilacap

Candra Dinata, S.Pd.

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

EDITOR

**Muhammad Fauzan Nuri
Misbahuddin, S.Pd.**

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu kawasan industri yang sedang berkembang pesat di Indonesia adalah KEK Morowali, dengan sektor keunggulan di bidang industri pengolahan nikel dan pertambangan. Idealnya, SPV di KEK Morowali dan sekitarnya mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai keunggulan wilayah tersebut. Oleh karena itu, penyelarasan antara SPV dan kebutuhan dunia kerja menjadi sangat krusial. Tidak selarasnya SPV dapat berdampak pada lulusan yang tidak siap kerja, karena tidak memiliki kompetensi

yang sesuai. Selain itu, akan terbentuk gap antara *demand* dan *supply* hingga berakibat pada meningkatnya angka pengangguran. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan SPV berbasis industri atau keunggulan wilayah di KEK Morowali. Hasil kajian ini mengungkap bahwa tingkat keselarasan SPV industri mitra berdasarkan enam dimensi (kurikulum, pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, serta kemitraan) termasuk dalam kategori cukup selaras. Kajian ini juga mengungkap masalah-masalah esensial yang ada di SPV dan industri serta menghasilkan rekomendasi bagi SPV, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan industri agar berkontribusi dalam peningkatan penyelarasan satuan pendidikan vokasi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kata kunci: keselarasan, satuan pendidikan vokasi, dunia industri, morowali

PENDAHULUAN

Satuan pendidikan vokasi (SPV) memiliki peran penting dalam membekali peserta didik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja yang sangat dinamis dewasa ini. Pendidikan vokasi adalah suatu bentuk pendidikan formal yang berfokus pada penguasaan keahlian

terapan tertentu dengan berbagai tujuan, termasuk persiapan kerja, identifikasi pekerjaan pilihan, dan pengembangan karir dalam kehidupan kerja (Chen & Pastore, 2024; Okolie et al., 2020). Tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan teknis, pendidikan vokasi juga memiliki peran esensial dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil, terlatih, siap memasuki dunia kerja. Selain itu, pendidikan vokasi juga memiliki kecenderungan untuk mencerminkan fluktuasi ekonomi secara dekat (Chen & Pastore, 2024). Dengan kata lain, pendidikan vokasi berperan penting melalui penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan pada akhirnya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan vokasi saat ini dihadapkan pada tuntutan untuk terus beradaptasi dalam merespon perubahan global yang cepat dan dinamis. Perubahan teknologi yang pesat, evolusi kebutuhan pasar kerja, dan dinamika ekonomi global yang fluktuatif menuntut pendidikan vokasi agar tetap responsif dan relevan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan vokasi harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan industri. Satuan pendidikan vokasi harus mampu memastikan lulusannya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja. Namun banyak program pendidikan vokasi

tidak selalu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri dengan cepat (Köhler & Drummer, 2018; Sudira, 2019), sehingga lulusan kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Dalam rangka meningkatkan keselarasan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, maka diperlukan analisis keselarasan pendidikan vokasi berbasis industri atau keunggulan wilayah. Analisis keselarasan dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan kebutuhan jabatan kerja berbasis industri dan sektor keunggulan wilayah tertentu.

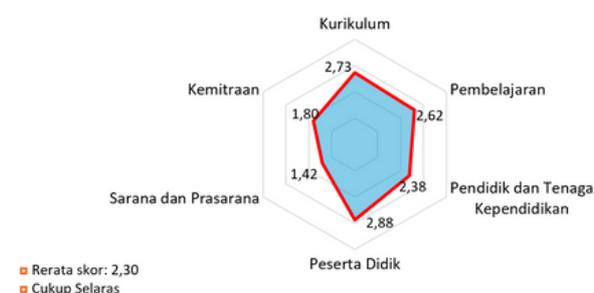
Salah satu kawasan industri yang sedang berkembang pesat adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morowali. Sektor keunggulan wilayah di KEK Morowali yaitu sektor industri pengolahan nikel dan pertambangan. Idealnya, satuan pendidikan vokasi di wilayah ini mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai keunggulan wilayah sekitar. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan SPV berbasis industri atau keunggulan wilayah di KEK Morowali. Hasil dari kajian ini berupa rekomendasi bagi SPV, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan industri agar berkontribusi dalam penyelarasan satuan pendidikan vokasi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

DESKRIPSI MASALAH

Data kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi, *focus group discussion* (FGD), dan observasi. Hasil analisis data menunjukkan temuan menarik terkait analisis keselarasan satuan pendidikan vokasi di KEK Morowali. Temuan dari kajian ini dapat menjadi refleksi bagi pengelola satuan pendidikan vokasi dan para stakeholder untuk terus berupaya menyelaraskan satuan pendidikan vokasinya dengan kebutuhan industri sekitar.

a. Tingkat keselarasan SPV dengan industri mitra

Bagian ini mengkaji enam dimensi penyelarasan yang meliputi kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, dan kemitraan. Tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi di wilayah KEK Morowali memperoleh skor 2,30 dalam skala 4 yang masuk dalam kategori cukup selaras seperti disajikan pada pada Gambar 1.



Meskipun demikian, masih ada permasalahan atau bagian lemah yang membutuhkan peningkatan sebagaimana disajikan pada Tabel 1

menampilkan rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan vokasi dengan industri mitranya.

TABEL 1. Keselarasan SPV dengan Industri Mitra di Wilayah KEK Morowali

No	Dimensi	Masalah
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> Hanya beberapa SPV yang mengkonfirmasi keterlibatan industri dalam penyusunan, peninjauan, monitoring, dan evaluasi kurikulum
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Hanya beberapa SPV yang mengkonfirmasi keterlibatan industri dalam proses pembelajaran seperti magang, PKL, uji kompetensi, magang guru/dosen, dan guru tamu Baru ada satu politeknik dan satu SMK yang memiliki program studi sesuai dengan keunggulan wilayah KEK Morowali
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan di SMK wilayah KEK Morowali memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu
4	Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar lulusan SPV di wilayah KEK Morowali bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya, kecuali lulusan yang berasal dari program studi bidang pertambangan PT. IMIP sebagai industri terbesar di wilayah KEK Morowali saat ini hanya

No	Dimensi	Masalah
5	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana yang tersedia di SPV mayoritas memadai, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai • Bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah terlalu canggih, sehingga tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran
6	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan SPV dengan industri mitra belum sepenuhnya terlaksana secara tuntas dan menyeluruh • Industri tambang di wilayah KEK Morowali belum memberikan kesempatan magang bagi siswa SMK

b. Masalah kebutuhan dan kualifikasi kerja

Sektor unggulan di wilayah KEK Morowali adalah industri pengolahan nikel dan pertambangan. PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan nikel terbesar yang berada di wilayah KEK Morowali. Saat ini, PT. IMIP mempekerjakan sekitar 81.000 orang (per April 2024), dan diproyeksikan membutuhkan sekitar 97.472 tenaga kerja di tahun 2025. Belum lagi akan banyak tenaga kerja yang diprediksi akan resign dan berpindah ke wilayah industri tambang baru yang sedang dan akan dibuka di wilayah Sulawesi lainnya. Kebutuhan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional PT. IMIP akan mencapai 20.000 orang. Meskipun demikian,

suplai tenaga kerja maupun lulusan pada sektor tersebut masih dinilai masih minim. Sebagai contoh, PT. IMIP saat ini hanya menerima tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi, baik dari PT Akademik maupun PT Vokasi. Padahal, di Morowali baru ada satu perguruan tinggi vokasi, yakni Politeknik Industri Logam Morowali. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja di kawasan Morowali tidak hanya di sektor industri pengolahan/pertambangan. Beberapa usaha pendukung lain juga berkembang pesat di sekitar kawasan, seperti usaha penyedia makanan, penyedia bahan baku makanan, dan penyedia kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, SPV harus mampu menangkap peluang penyediaan tenaga kerja dan/atau wirausaha di sektor pendukung yang berada di wilayah KEK Morowali.

c. Masalah hard skill dan soft skill lulusan

Kajian ini menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara *hard skill* dan *soft skill* yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan industri. Permasalahan *hard skill* merujuk pada minimnya kompetensi atau keterampilan dasar lulusan terkait bidang yang mereka tekuni. Sebagai contoh, banyak dari tenaga kerja yang memiliki kemampuan minim dalam mengoperasikan alat berat, mengoperasikan *drone*, dan kemampuan teknisi mesin. Sementara itu, permasalahan *soft skill*, tidak sedikit industri yang mengeluhkan kurangnya *soft skill* lulusan SPV saat ini, termasuk kedisiplinan, tanggung jawab terhadap *jobdesk*, kemampuan kerja sama, integritas, serta yang paling sering menjadi sorotan terkait etika, resiliensi, dan daya juang.

d. Masalah kesesuaian materi ajar dengan kebutuhan industri

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara materi yang diajarkan di SPV dengan materi sesuai kebutuhan industri. Pada sektor industri tambang beberapa materi yang dibutuhkan industri seperti metalurgi, kimia mineral, pilot *drone*, dan elektronika industri. Namun materi ini belum sepenuhnya di ajarkan oleh satuan pendidikan vokasi di KEK Morowali. Pada sektor industri konstruksi membutuhkan materi tentang arsitektur dan perencanaan wilayah dan kota.

e. Masalah sertifikasi kompetensi

Kebutuhan sertifikat kompetensi oleh industri di wilayah KEK Morowali bervariasi. Secara umum, industri-industri di wilayah KEK Morowali tidak selalu membutuhkan calon pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Pengalaman, *skill*, dan *attitude* lebih diutamakan dalam proses rekrutmen. Namun, calon pekerja yang memiliki sertifikasi kompetensi akan menjadi nilai tambah. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi masih memiliki nilai dan dapat menjadi nilai tambah bagi calon pekerja. Sebagai contoh di sektor pertambangan membutuhkan sertifikasi *welder* dan pilot *drone*.

REKOMENDASI

a. Pengembangan kurikulum berbasis industri

SPV di wilayah KEK Morowali perlu meningkatkan keterlibatan industri wilayah sekitar dalam penyusunan, peninjauan, *monitoring*, dan evaluasi kurikulum. Hal ini bertujuan supaya kurikulum SPV diselaraskan dengan potensi keunggulan wilayah KEK Morowali. SPV dan industri perlu menciptakan ekosistem yang baik untuk selalu memutakhirkan kurikulum agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

b. Peningkatan kerjasama dengan industri dan pemerintah

Optimalisasi kerjasama dan kemitraan dengan industri dan pemerintah perlu dilakukan dengan masif oleh setiap SPV di wilayah KEK Morowali. Perlu adanya inovasi bentuk kerjasama dengan industri, supaya bentuk kerjasama tidak hanya pelaksanaan magang atau praktik kerja lapangan saja. Inovasi bentuk kerjasama antara lain yaitu pelaksanaan guru/dosen tamu dari industri, pelaksanaan kelas industri, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, magang guru, magang dosen, magang tenaga kependidikan, rekrutmen tenaga kerja, dan *job fair*.

c. Peningkatan kapasitas SDM

Sumber daya manusia SPV menjadi salah satu sektor vital yang harus ditingkatkan kompetensi dan kapabilitasnya. Tenaga pendidik SPV (guru, dosen, instruktur) perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi dan kapasitas keilmuannya, salah satunya penggunaan alat yang sesuai dengan standar industri. Program *upskilling* dan *reskilling* perlu dilakukan untuk peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan dengan pelaksanaan magang industri bagi guru/dosen/instruktur, *workshop*, sertifikasi kompetensi, dan lokakarya.

d. Penyelenggaraan program studi baru

Wilayah KEK Morowali sangat berpotensi pada sektor industri pengolahan nikel dan pertambangan, namun baru ada satu politeknik dan satu SMK yang memiliki program studi yang relevan dengan keunggulan wilayah tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah mendorong SPV untuk menyelenggarakan program studi baru yang relevan dengan kebutuhan wilayah tersebut. Sebagai contoh program studi yang dapat diselenggarakan antara lain Teknik Listrik, Teknik Kimia Mineral, Teknik Metalurgi, Teknik Pertambangan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu perlu adanya peninjauan ulang tentang keselarasan program studi yang sudah ada (eksisting) dengan kebutuhan jabatan kerja yang ada di wilayah KEK Morowali.

e. Penyelenggaraan pelatihan kerja

Selain perlu adanya penyelenggaraan program studi baru, perlu juga penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah KEK Morowali. Pelatihan kerja ini dapat berupa pelatihan kompetensi teknis maupun pelatihan pendukung. Pelatihan kompetensi teknis terutama perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri pengolahan nikel dan pertambangan. Sementara itu pelatihan kerja pendukung dapat berupa pelatihan bahasa asing yang meliputi *english for specific purposes* dan bahasa mandarin.

REFERENSI

- Chen, J., & Pastore, F. (2024). *Dynamics of returns to vocational education in China: 2010–2017*. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02616-2>
- Köhler, T., & Drummer, J. (2018). *Recent Technological Challenges in (Vocational) Education*. In J. Drummer, G. Hakimov, M. Joldoshev, T. Köhler, & S. Udartseva (Eds.), *Vocational Teacher Education in Central Asia* (Vol. 28, pp. 3–14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73093-6_1
- Okolie, U. C., Nwajiuba, C. A., Binuomote, M. O., Osuji, C. U., Onajite, G. O., & Igwe, P. A. (2020). *How careers advice and guidance can facilitate career development in technical, vocational education, and training graduates: The case in Nigeria*. *Australian Journal of Career Development*, 29(2), 97–106. <https://doi.org/10.1177/1038416220916814>
- Sudira, P. (2019). *The Role Of Vocational Education In The Era Of Industrial Automation*. *Journal of Physics: Conference Series*, 1273(1), 012058. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1273/1/012058>



**PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI
BALI: SEKTOR EKONOMI KREATIF**

PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI BALI: SEKTOR EKONOMI KREATIF

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Devi Istyaningrum

Ketua Tim Kerja Penyelarasan SDM Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Prof. Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Wagiran, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Bayu Rahmat Setiadi, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Galeh Nur Indriatno Putra Pratama, M. Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Arif Ainur Rafiq, S.T, M.T, M.Sc.

Dosen Jurusan Rekayasa Elektronika dan Mekatronika di Politeknik Negeri Cilacap

Candra Dinata, S.Pd.

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

EDITOR

Muhammad Fauzan Nuri Misbahuddin, S.Pd.

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan vokasi di Bali memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja, khususnya di sektor ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di dunia, Bali membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis tetapi juga mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif

yang dinamis. Oleh karena itu, penyesuaian antara satuan pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha menjadi sangat krusial.

Hasil kajian di Wilayah ekonomi kreatif Bali mengilustrasikan dan menunjukkan bahwa Bali memiliki *domain demand* yang lengkap mulai dari tingkat SMK, DI, DII, DIII, DIV, S2 Terapan, dan LKP (1Y+2Y). Hampir seluruh SMK di Bali telah menerapkan tiga pola pembelajaran utama untuk menanggapi kebutuhan industri, yaitu kelas industri, kelas wirausaha, dan kelas akademik.

Lebih lanjut, LKP di Bali memiliki bidang-bidang yang spesifik sesuai dengan kebutuhan baik di dalam negeri (DN) maupun luar negeri (LN). Bidang prioritas yang diidentifikasi adalah *F&B services*, *housekeeping*, dan *culinary*. LKP berperan sebagai "*agent*" untuk penyaluran tenaga kerja di luar negeri, dengan permintaan tinggi di bidang *spa*, *hotel maintenance*, dan *engineering hospitality*.

Politeknik di Bali turut mendukung dengan menyediakan berbagai program seperti Program Reguler, Kelas Internasional, Kelas RPL, Kelas Kerjasama, dan Kelas Spesialisasi yang berlangsung selama tiga semester. Catatan tambahan dalam kajian ini menyoroti fenomena *overtourism*, peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), optimasi UMKM-BumDes-Desa Wisata, serta perlunya ekosistem/fasilitas

komunikasi keselarasan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa Bali telah berusaha keras untuk menyesuaikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, terutama dalam sektor ekonomi kreatif. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek untuk memastikan lulusan siap menghadapi tuntutan industri dan berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian daerah.

Kata kunci:

Dunia Kerja, Keselarasan, Satuan Pendidikan Vokasi, Bali

PENDAHULUAN

Masalah keselarasan di satuan Pendidikan Vokasi menjadi suatu hal yang wajib untuk diperhatikan. Hal tersebut telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun (2016) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perhatian tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 68 tahun (2022) tentang Penyelarasan Pendidikan Vokasi. Cakupan pendidikan vokasi tersebut adalah Satuan Pendidikan Vokasi (SPV) terdiri dari Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), SMK, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang berkontribusi dalam devisa negara melalui sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif menjadi andalan Provinsi Bali selain sektor pariwisata. Sektor ekonomi kreatif didukung oleh sub-sub sektor unggulan, diantaranya Aplikasi, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, serta *game developer*. Seluruh sub sektor tersebut menyebar di kota/kabupaten di provinsi Bali. Berdasarkan data statistik kondisi subsektor ekonomi kreatif tahun 2023 tercatat 4.998 pelaku usaha dengan sub sektor tertinggi adalah

kriya sebanyak 3.745 pelaku usaha, kuliner sebanyak 298 pelaku usaha, dan fotografi sebanyak 230 pelaku usaha. Sedangkan, sub sektor terendah adalah televisi dan radio serta desain produk. Untuk wilayah tertinggi sub sektor ekonomi kreatif di kabupaten Bangli dengan jumlah pelaku usaha 3.584 dan yang terendah ada di wilayah kabupaten Gianyar dengan jumlah pelaku usaha 41.

Ditinjau berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Provinsi Bali memiliki 3 kontributor PDRB tertinggi yakni Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (19,98%), Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,51%), dan Sektor Konstruksi (10,19%), sedangkan sisanya didukung oleh sektor lain. Kontribusi PDRB sebagian besar terwakili oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sebagai contoh, Sektor Akomodasi dan Makan Minum terkonsentrasi pada wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Selain itu, daerah lain yaitu Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Tabanan difokuskan pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Potret ini sejalan dengan sub-sub sektor ekonomi kreatif penggerak ekonomi dan kewirausahaan di Provinsi Bali.

Peningkatan laju investasi dan kontribusi satuan pendidikan vokasi di Provinsi Bali telah memberikan penurunan jumlah pengangguran dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat jumlah Pengangguran

138.669 orang, turun 0,94% pada tahun 2022, dan turun tajam pada tahun 2023 sebesar 55,09% dengan jumlah 72.421 orang. Penurunan signifikan dari laju pengangguran tentunya merupakan langkah preventif kontributif satuan pendidikan vokasi (SPV) yang terdiri atas Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam memenuhi kualifikasi dan kompetensi dunia kerja di Provinsi Bali. Kekuatan sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali didukung oleh kompetensi keahlian yang tumbuh subur meliputi Perhotelan, Kuliner, Akuntansi, dan Teknik Komputer dan Jaringan, serta mulai meningkat animo input peserta didik SPV untuk beralih pada Usaha Layanan Wisata. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan potensi wilayah di Provinsi Bali yang secara infrastruktur fisik dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja telah disinkronkan dengan suplai SPV untuk menjawab tantangan dunia kerja baik di dalam dan luar Provinsi Bali.

Kajian ini akan menjadi informasi fenomena keberhasilan penyelerasan SPV dengan dunia kerja di Provinsi Bali. Keselarasan dilihat dalam sudut pandang demand dan supply SPV di Sektor Ekonomi Kreatif. Pihak-pihak utama terlibat dalam analisis keselarasan tersebut meliputi: pimpinan di SPV baik LKP, SMK, maupun PTV, industri mitra di Provinsi Bali, dan pengelola di Kawasan Ekonomi

Khusus Kura-Kura. Hasil akhir kajian ini adalah berupa rekomendasi terhadap fenomena keberhasilan keselarasan SPV dengan dunia kerja dari hulu sampai hilir.

Sasaran kajian adalah keselarasan data dan informasi antara demand dan supply pendidikan vokasi di Sektor Ekonomi Kreatif Bali. Cangkupan subyek kajian adalah Pendidikan Vokasi meliputi PTV, SMK, LKP, dan industri mitra satuan pendidikan vokasi. Untuk tingkat satuan pendidikan vokasi, sasaran adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan DUDI dan lulusan serta pimpinan satuan pendidikan vokasi, sedangkan DUDI diarahkan pada pihak-pihak yang terlibat langsung pengembangan dan rekrutmen sumber daya manusia. Output yang dihasilkan adalah naskah akademik terkait hasil analisis keselarasan demand dan supply di wilayah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi dan prediksi pemenuhan kebutuhan demand dan supply.

Kajian ini terdiri dari enam aspek keselarasan yang meliputi:

- Mengkaji data suplai satuan pendidikan vokasi;
- Mengkaji data kebutuhan jabatan kerja pada satuan Pendidikan vokasi;
- Mendapatkan rekomendasi kebutuhan kualifikasi kerja ke depan;

- Mendapatkan informasi kebutuhan hard skill, soft skill, materi ajar atau kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja;
- Mendapatkan rekomendasi kebutuhan sertifikat kompetensi oleh dunia kerja, dan;
- Mendapatkan informasi sektor unggulan berbasis wilayah yang dibutuhkan oleh industri sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pengembangan pada Satuan Pendidikan Vokasi (SPV).

HASIL KAJIAN: POTRET KESELARASAN

Berdasarkan pengumpulan data baik dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh SPV di Provinsi Bali bersama industri mitra serta *Focus Group Discussion* (FGD) bersama SPV dan industri mitra,

didapatkan sintesa fenomena keselarasan ideal di Provinsi Bali sebagai berikut.

a. Keselarasan SPV dengan DUDI

Bagian yang dikaji pada identifikasi ini meliputi kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, dan kemitraan. Secara rata-rata, enam aspek tersebut jika dilihat dari analisis keselarasan mendapatkan hasil yang selaras dengan skor 3,041/5. Beberapa aspek yang sangat unggul adalah kualitas peserta didik, pembelajaran, dan kurikulum yang di atas rerata, sedangkan di bawah rerata meliputi aspek sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan dan kemitraan. Tabel 1 di bawah ini menjelaskan beberapa aspek dan masalah yang perlu ditingkatkan dalam kapasitas peningkatan mutu dan layanan SPV di Provinsi Bali.

TABEL 1. Permasalahan terkini untuk aspek tingkat keselarasan SPV dengan DUDI di Provinsi Bali

No	Dimensi	Masalah
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum yang didesain SPV bersama industri mitra untuk bidang-bidang di luar Sektor Ekonomi Kreatif dan Pariwisata secara operasional masih bersifat umum karena terpacu oleh pengembangan-pengembangan kebijakan kurikulum pusat maupun provinsi.

2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Program PKL/Magang atau program <i>internship</i> serupa masih perlu penguatan secara mental dan fisik kepada peserta didik karena kualitas dan keberagaman karakterisasi dari peserta didik menyebabkan keberterimaan di industri tidak seantusias sebelum Pandemi Covid-19.
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pematangan program <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> bagi pendidik vokasi di tingkat LKP masih bersifat program dan tidak terencana secara kontinue berkelanjutan untuk mendukung tingkatan pada level kompetensi yang mendukung profesionalitas pekerjaan. • Seluruh pendidik SPV memiliki andil besar untuk mengupgrade <i>hardskill</i> dan <i>softskill</i> berbasis dunia kerja sehingga dapat mengajarkan dan membudayakan kebiasaan di dunia kerja yang tercermin dalam profesionalitas tenaga pendidik.
4	Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik di bidang perhotelan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan pelaksanaan program PKL/Magang dengan sasaran pada hotel berbintang tinggi (4 atau 5) sehingga cukup menimbulkan kesenjangan bagi hotel-hotel bagi grade di bawahnya. • Perlunya peningkatan dan konsistensi dalam mendidik peserta didik untuk membangkitkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, pantang menyerah dan tanggung jawab • Peserta didik di setiap SPV tidak hanya kompeten dalam bidang keahliannya, melainkan juga dilengkapi dengan sertifikat bahasa asing dimana jumlah ini perlu ditingkatkan sebagai tujuan utama Provinsi Bali sebagai destinasi pilihan wisatawan mancanegara.

5	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan sarana dan prasarana SPV belum sepenuhnya merata karena besarnya ketimpangan bagi SPV yang sering mendapatkan bantuan pemerintahan. Bagi SPV berstatus swasta, terdapat keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana dengan tuntutan yang diharapkan sesuai standar industri. • Keterlibatan industri untuk berkontribusi dalam pemenuhan sarana dan prasarana SPV masih minim. • Khusus LKP, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pemenuhan keterampilan tenaga kerja terampil siap • kerja masih sangat terbatas sehingga LKP perlu menjalin kerjasama yang intensif dengan industri.
6	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan SPV dengan industri mitra belum sepenuhnya terlaksana secara tuntas, hanya efektif dalam pelaksanaan perencanaan dan implementasi. Untuk tahap evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan, industri mitra cenderung pasif menunggu kehadiran SPV untuk menjalin kemitraan.

b. Kebutuhan Jabatan dan kualifikasi kerja

Berbagai jabatan yang dibutuhkan mencakup pada lima sektor pekerjaan yaitu pariwisata dan perhotelan, kuliner dan jasa boga, teknologi informasi digital, konstruksi Teknik, dan lingkungan dan keberlanjutan. Kualifikasi yang dibutuhkan meliputi manajer hotel, *front office manager*, *food and beverage manager*, *housekeeping supervisor*, *executive chef*, *pastry chef*, barista, *IT manager*, *digital marketing specialist*, *web developer*, *project manager*, *electrical engineer*, *welding technician*, *environmental manager*, dan *sustainability coordinator*. Setiap jabatan ini memerlukan kualifikasi tertentu, termasuk pendidikan formal, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesional yang sesuai.

Provinsi Bali memiliki keunikan penyelerasan dibandingkan wilayah lain. Provinsi Bali dapat dikatakan *over demand* (kelebihan permintaan/kekurangan tenaga kerja). Istilah ini dihadapkan dengan banyaknya dunia kerja dari Sektor Ekonomi Kreatif untuk tingkat usaha kecil, mikro, menengah, dan besar merekrut para lulusan SPV. Para lulusan SPV diberikan tiga alternatif peluang kerja yaitu: (1) bekerja di dalam Provinsi Bali; (2) bekerja di luar Provinsi Bali; dan (3) bekerja di luar negeri. Saat ini, kecenderungan peminatan bekerja adalah bekerja di luar negeri dimana LKP menjadi kunci untuk memobilisasi calon tenaga kerja

Provinsi Bali untuk ke luar negeri. Hal inilah menjadi salah satu penyebab kebutuhan tenaga kerja di Provinsi Bali menjadi berkurang meskipun arus tenaga kerja dari luar dan asing mulai berdatangan. Salah satu bidang pekerjaan yang sulit didapatkan industri adalah hotel engineer dengan basic dari bidang teknologi dan rekayasa. SPV dengan bidang tersebut sangat minim kuantitasnya, namun kebutuhan dari industri sangat tinggi hingga harus mengantri untuk merekrut tenaga kerja tersebut.

c. Kebutuhan *hard skill* dan *soft skill* lulusan SPV

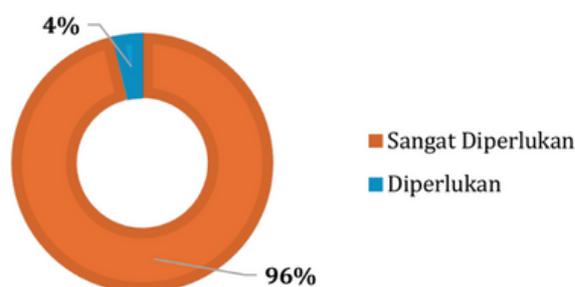
Kebutuhan *hard skill* tenaga kerja di Provinsi Bali didukung oleh kemampuan teknis dan pendukung. Kemampuan teknis merupakan bidang keahlian yang ditekuni lulusan SPV sehingga sinkronisasi dengan dunia kerja selaras dengan kebutuhan. Namun, untuk kompetensi pendukung seperti kemampuan layanan dan komunikasi dengan bahasa Inggris sangat dibutuhkan sebagai pendamping dalam kompetensi teknis.

Kebutuhan *soft skill* dunia kerja di Provinsi Bali lebih mengedepankan interpersonal dari pekerja. Kemampuan komunikasi dan interaksi yang baik, cekatan, bertanggungjawab dengan tuntutan waktu yang efisien, disiplin terhadap waktu dan pekerjaan, adaptif dan *problem solving*, dan berbagai karakter lain yang

mendukung perkembangan kebutuhan layanan jasa dan produk di Sektor Ekonomi Kreatif.

d. Kebutuhan materi ajar SPV

Kebutuhan materi ajar SPV di Provinsi Bali dapat dikatakan sangat relevan. Hal ini dikarenakan relevansi yang baik antar jenjang SPV dengan industri mitra. Industri memberikan rekomendasi terkait batasan jenjang-jenjang SPV sehingga sinkronisasi kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sinergis dan berdampak. Berikut ini merupakan penilaian industri terhadap materi- materi ajar yang diajarkan SPV kepada peserta didik.



GAMBAR 1. Kecocokan industri terhadap CP dan TP Satuan Pendidikan Vokasi di Provinsi Bali

e. Kebutuhan sertifikat kompetensi kerja

Sertifikasi kompetensi teknis dan pendukung sangat dibutuhkan oleh industri di wilayah Provinsi Bali. Hal ini dibutuhkan industri untuk memberikan citra positif kepada pelanggannya bahwa tenaga kerja yang direkrut berkualifikasi. Kompetensi teknis yang diperoleh

SPV dapat merujuk pada tingkat Lembaga Sertifikasi Profesi baik ranah P1, P2, dan P3. Bahkan, sertifikasi berbasis internasional sangat dibutuhkan untuk pekerjaan teknis spesifik seperti mikrotik, software, chef, dan kemampuan teknis spesialis lainnya. Kompetensi pendukung diutamakan mampu berbahasa Inggris secara komunikatif meskipun skor TOEFL bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Ketika calon tenaga kerja dapat berkomunikasi bahasa Inggris sesuai kemampuan teknisnya pada saat wawancara, maka dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Fenomena banyaknya tenaga kerja yang dapat bekerja di luar negeri merupakan peran besar LKP dalam memberikan sertifikat kompetensi internasional yang mendukung dalam keberterimaan pekerjaan di luar negeri.

REKOMENDASI

a. Integrasi Mendalam Kurikulum antar Satuan Pendidikan Vokasi

Integrasi kurikulum merupakan tahap sinkronisasi antar seluruh SPV di Provinsi Bali. Praktik baik masing-masing jenjang SPV dengan industri mitra dapat semakin diikat kuat melalui proses integrasi yang berkelanjutan. Pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan dapat melibatkan SPV lain pada jenjang yang berbeda sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di industri semakin terarah, linear, dan berkesinambungan.

b. Pemerataan PKL/Magang pada Industri Mitra segala Bidang dan *Grade* Kualitas

Kebijakan pemerataan implementasi PKL/Magang pada seluruh tingkat industri mitra merupakan potensi yang dapat bermanfaat sebagai peningkatan kualitas dan layanan industri tingkat mikro, kecil, dan menengah. Pemerataan tersebut dapat memberikan peran optimal SPV dalam pengembangan sub-sub sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali. Sub-sub sektor ekonomi kreatif yang banyak diisi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan sentuhan dari SPV untuk melakukan perbaikan mutu, layanan, dan produktivitas dengan mekanisme pelaksanaan PKL/magang sesuai dengan karakteristik dari jenjang pendidikan masing-masing.

c. *Upskilling* dan *Reskilling* untuk Pendidik di Satuan Pendidikan Vokasi

Upskilling dan *reskilling* merupakan program rutin yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pemerataan dapat diarahkan secara merata dan menyeluruh untuk representatif dari pendidik di LKP, SMK, dan PTV. Diseminasi pada program *upskilling* dan *reskilling* di masing-masing SPV sebaiknya merupakan runtutan program yang termonitoring oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi secara tuntas dan terukur.

d. Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing Lain selain Bahasa Inggris

Provinsi Bali merupakan destinasi wisata mancanegara sehingga SPV perlu melakukan mitigasi dalam mempersiapkan kebutuhan permintaan tenaga kerja di industri. Praktik baik yang dilaksanakan di Provinsi Bali telah membekali peserta didik untuk memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik. Namun, merujuk pada meningkatnya jumlah investor, wisatawan mancanegara, dan pekerja asing dari luar Provinsi Bali dan internasional, maka pembekalan keterampilan dalam berkomunikasi pada bahasa asing lain patut untuk diajarkan sebagai pendukung dalam kompetensi teknis. Kemampuan dalam mengembangkan konten-konten digital dan media sosial dipadukan dengan kemampuan multi-bahasa dapat menjadi keunikan lulusan SPV di Provinsi Bali yang kompetitif baik bersaing di dalam maupun luar negeri.

e. Substitusi Pajak Industri ke Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Vokasi

Kebijakan *super tax deduction* yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan kepada pelaku usaha Sektor Ekonomi Kreatif belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut yang membuat kemitraan SPV dengan industri mitra cenderung searah. Adanya tanggung jawab industri mitra dalam mengembangkan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan ketika adanya peran pemerintah. Sebagai contoh, bantuan pemerintah melalui SMK Pusat Keunggulan skema pepadanan dan program dana padanan di PTV ternyata mampu memantik industri mitra berkontribusi dalam pengembangan sarana dan prasarana SPV. Untuk mengikat lebih erat, perlu adanya substitusi pajak yang dikeluarkan oleh industri mitra sebagai bagian dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam SPV sehingga fasilitas dapat terstandar sesuai harapan dunia kerja.

f. Ekosistem Kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi berbasis Ekonomi Kreatif

Satuan Pendidikan Vokasi di Provinsi Bali merupakan *best practices* yang baik dalam penyelerasan dengan industri mitra. Setiap jenjang pada SPV yaitu SMK, D1, D2, D3,D4, S2, dan LKP memiliki pasar tenaga kerjanya masing-masing dan industri pasangan yang bermitra juga tersedia. Kondisi over-demand tersebut dapat terpenuhi secara normal dengan mengembangkan sistem informasi khusus Provinsi Bali untuk mendata secara menyeluruh pengangguran yang berasal dari SPV untuk memenuhi kualifikasi tuntutan kebutuhan over-demand tersebut. Peran LKP dalam menyeleraskan kebutuhan over-demand melalui alumni SPV yang belum bekerja dapat diintervensi melalui kebijakan di Pemerintah Pusat dan Daerah.

REFERENSI

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun (2016) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 68 tahun (2022) tentang Penyelerasan Pendidikan Vokasi
3. Triyono, B et al. (2024). Analisis Keselarasan Satuan Pendidikan Vokasi Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Di KEK Kendal, IKN, Dan Ekonomi Kreatif Bali. Jakarta. Direktorat MITRAS DUDI Ditjen Vokasi

APENDIKS

PENYELARASAN

SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA
DI PROVINSI BALI: SEKTOR EKONOMI KREATIF



TINGKAT KESELARASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DENGAN DUNIA KERJA/INDUSTRI
DI WILAYAH BALI



KEBUTUHAN JENIS SERTIFIKASI KOMPETENSI
TIAP BIDANG DI WILAYAH BALI



SEKTOR UNGGULAN DI WILAYAH BALI

- 01 **Manajemen Perhotelan dan Pariwisata**
Keterampilan dalam manajemen hotel, layanan tamu, housekeeping, dan manajemen acara (event)
- 02 **Kuliner dan Restoran**
Seni kuliner, manajemen restoran, dan layanan makanan dan minuman
- 03 **Seni dan Budaya**
Seni pertunjukan, manajemen seni, dan konservasi budaya.
- 04 **Rekreasi dan Hiburan. Keterampilan**
Manajemen fasilitas rekreasi, pemandu wisata, dan perjalanan wisata
- 05 **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
Pengembangan aplikasi, manajemen sistem informasi, dan keamanan siber

PERINGKAT PDRB DI WILAYAH BALI





**PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI
KALTIM: WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA**

PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI KALTIM: WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Devi Istiyaningrum

Ketua Tim Kerja Penyelarasan SDM Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Prof. Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Wagiran, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Bayu Rahmat Setiadi, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Galeh Nur Indriatno Putra Pratama, M. Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Arif Ainur Rafiq, S.T, M.T, M.Sc.

Dosen Jurusan Rekayasa Elektronika dan Mekatronika di Politeknik Negeri Cilacap

Candra Dinata, S.Pd.

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

EDITOR

Muhammad Fauzan Nuri Misbahuddin, S.Pd.

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia di Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi tantangan dan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sektor pendidikan terutama satuan pendidikan vokasi. Tantangan tersebut semakin berat ketika IKN menjadi harapan baru untuk turut mencapai Indonesia Maju sesuai dengan misi Indonesia 2045. Sebagai identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat

Transformasi Ekonomi Indonesia. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya upaya untuk mempersiapkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan memadai. Termasuk kualitas pembelajaran dan lulusan yang nantinya dihasilkan. Oleh karena itu, penyelarasan antara satuan pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha dunia industri (DUDI) menjadi sangat krusial. Tidak selarasnya satuan pendidikan vokasi dapat berdampak pada lulusan yang tidak siap bekerja karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai, terbentuknya gap antara demand dan supply hingga berakibat meningkatnya angka pengangguran.

Kajian di wilayah IKN telah dilakukan untuk melihat relevansi pendidikan vokasi yang sudah ada sekarang. Hasil ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan kebijakan pemerintah terhadap keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Satuan pendidikan di IKN yang terdiri dari SMK, PTV, dan LKP memiliki tingkat keselarasan Cukup Selaras dengan 6 aspek yang dinilai meliputi kurikulum, pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, peserta didik, serta sarana dan prasarana. Kajian ini juga mengungkap masalah-masalah esensial yang ada di satuan pendidikan vokasi dan DUDI serta memberikan rekomendasi-rekomendasi konkrit. Direktorat pendidikan vokasi sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat menggunakan hasil kajian ini untuk

merancang strategi guna menghadapi tantangan-tantangan pada satuan pendidikan vokasi saat ini maupun di masa depan.

Kata kunci:

Dunia Kerja, Keselarasan, Satuan Pendidikan Vokasi, IKN

PENDAHULUAN

Masalah keselarasan di satuan Pendidikan Vokasi menjadi suatu hal yang wajib untuk diperhatikan. Hal tersebut telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun (2016) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perhatian tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 68 tahun (2022) tentang Penyelarasan Pendidikan Vokasi. Cakupan pendidikan vokasi tersebut adalah Satuan Pendidikan Vokasi (SPV) terdiri dari Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), SMK, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Pendidikan vokasi saat ini menjadi ujung tombak dalam suplai tenaga kerja pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pasalnya, suplai tenaga kerja dapat dilakukan apabila lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi dan kriteria sesuai dengan kebutuhan industri. Apabila itu tidak terpenuhi, lulusan-lulusan dari SPV tidak akan terserap dengan baik karena tidak siap kerja. SPV yang diharapkan mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja, justru menambah angka pengangguran.

Dalam konteks IKN, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaporkan bahwa pada Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur untuk lulusan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) masih merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,21 persen. Meskipun demikian, angka ini telah menurun dari 11,06 persen pada Februari 2022. Secara nasional, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7.885.075 orang di Indonesia. Fenomena tingginya TPT di kalangan lulusan SMK terasa janggal, mengingat data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2022 menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi tertinggi dalam lapangan kerja, yaitu sebesar 33,47 persen, diikuti oleh lulusan Diploma I/II/III dengan persentase 22,75 persen. Artinya antara kebutuhan lapangan kerja dengan suplai tenaga kerja tidak sepenuhnya mencapai titik temu, atau dalam kata lain tidak selaras. Menyikapi hal tersebut, pendidikan vokasi nampaknya harus berbenah dan menyiapkan strategi jitu untuk menciptakan lulusan yang berkompeten dan siap kerja, salah satunya melalui kajian penyelarasan pendidikan vokasi untuk landasan penyusunan regulasi. Adanya regulasi dalam penyelarasan pendidikan vokasi memberikan harapan terhadap suplai tenaga kerja yang meningkat dan sesuai dengan kebutuhan lapangan baik skala lokal, nasional, atau bahkan internasional.

Sasaran kajian adalah keselarasan data dan informasi antara demand dan supply pendidikan vokasi di

wilayah IKN. Cangkupan subyek kajian adalah Pendidikan Vokasi meliputi PTV, SMK, LKP, dan industri mitra satuan pendidikan vokasi. Untuk tingkat satuan pendidikan vokasi, sasaran adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan DUDI dan lulusan serta pimpinan satuan pendidikan vokasi, sedangkan DUDI diarahkan pada pihak-pihak yang terlibat langsung pengembangan dan rekrutmen sumber daya manusia. Output yang dihasilkan adalah naskah akademik terkait hasil analisis keselarasan demand dan supply di wilayah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi dan prediksi pemenuhan kebutuhan *demand* dan *supply*.

Kajian ini terdiri dari enam aspek keselarasan yang meliputi:

- Mengkaji data suplai satuan pendidikan vokasi;
- Mengkaji data kebutuhan jabatan kerja pada satuan Pendidikan vokasi;
- Mendapatkan rekomendasi kebutuhan kualifikasi kerja ke depan;
- Mendapatkan informasi kebutuhan *hard skill*, *soft skill*, materi ajar atau kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja;
- Mendapatkan rekomendasi kebutuhan sertifikat kompetensi oleh dunia kerja, dan;

- Mendapatkan informasi sektor unggulan berbasis wilayah yang dibutuhkan oleh industri sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pengembangan pada Satuan Pendidikan Vokasi (SPV).

HASIL KAJIAN: POTRET KESELARASAN

Data yang telah dikumpulkan melalui formulir kuesioner *demand-supply* dan penyelarasan, serta kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pada kajian ini selanjutnya dianalisis. Dari analisis tersebut didapatkan beberapa temuan menarik terkait permasalahan pada satuan pendidikan vokasi di wilayah IKN.

a. Keselarasan SPV dengan DUDI

Bagian yang dikaji pada identifikasi ini meliputi kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, dan kemitraan. Secara rata-rata, enam aspek tersebut jika dilihat dari analisis keselarasan mendapatkan hasil cukup selaras dengan skor 2,802/5. Meskipun demikian, tetap terdapat permasalahan atau bagian lemah yang membutuhkan peningkatan. Secara lebih lanjut Tabel 1 menampilkan rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh SPV beserta dengan mitra DUDI mereka.

TABEL 1. Permasalahan terkini untuk aspek tingkat keselarasan SPV dengan DUDI di wilayah IKN

No	Dimensi	Masalah
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Industri sudah turut dalam penyusunan dan peninjauan kurikulum, tetapi belum secara <i>continue</i> atau berkelanjutan sampai dengan monitoring dan evaluasi • Kurikulum SPV terlalu umum, tidak spesifik
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Program PKL di bidang keahlian Konstruksi mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan bidang keahlian lainnya seperti alat berat, pemesinan, elektro, elektronika, pertanian, dan kehutanan yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Di perlukan peningkatan program perbaikan, pendidik dan tenaga kependidikan di SMK wilayah IKN masih belum mencukupi, terutama yang sesuai dengan konsentrasi keahlian tertentu
4	Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan SPV di IKN terkonfirmasi cukup banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian • Lulusan SPV yang bekerja di IKN menurut industri masih belum siap kerja 100%, hal ini dikarenakan industri masih perlu memberikan <i>skill</i> tambahan ketika awal bekerja selama proses magang

5	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dimensi sarana dan prasarana di SPV wilayah IKN masih rendah khususnya SMK dan LKP. Hanya beberapa SMK saja yang mendapatkan kesempatan program padanan dari Pemerintah Pusat untuk upgrade sarana dan prasarana yang dimiliki. Sedangkan pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki LKP dilakukan secara mandiri, sehingga sangat terbatas dan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah
6	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan SPV dengan industri mitra belum sepenuhnya terlaksana secara tuntas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, rekrutmen, serta pengembangan kompetensi dan profesi

b. Kebutuhan Jabatan dan kualifikasi kerja

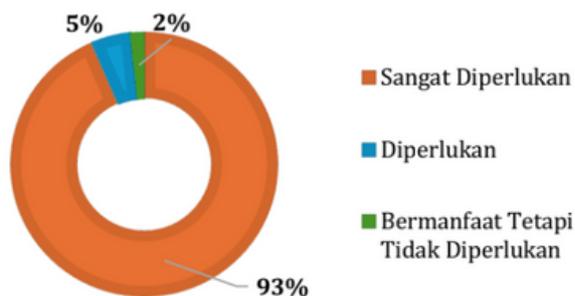
Arah pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara ke depan adalah menjadi kota yang smart, guna mewujudkan hal tersebut maka dijabarkan dalam beberapa indikator arah pengembangan antara lain 1) *Smart governance*; 2) *Smart transportation*, 3) *Smart living*, 4) *Smart energy*, 5) *Smart industri*, 6) *Smart infrastructure*. Hasil analisis menunjukkan bahwa di wilayah IKN telah terdapat sektor/bidang esensial yang mendukung pengembangan IKN seperti konstruksi, perhotelan, dan perkantoran. Meskipun demikian, suplai tenaga kerja maupun lulusan pada sektor tersebut masih dinilai sangat kurang. Belum lagi permasalahan kompetensi yang

kurang diakui oleh DUDI berdasarkan kualifikasi kerja yang dicari. Banyak industri justru mencari tenaga kerja dari luar Kalimantan untuk memenuhi kualifikasi kerja mereka. Artinya terdapat isu kualitas lulusan yang belum bisa bersaing.

c. Kebutuhan hard skill dan soft skill lulusan SPV

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kompetensi yang dimiliki oleh lulusan vokasi masih dinilai kurang oleh DUDI. Kompetensi ini dapat mencakup *hard skill* dan *soft skill* lulusan. *Hard skill* yang dimaksud mengarah kepada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai bidang yang mereka tekuni. Contoh saja pada industri konstruksi, mereka

menyampaikan jika tidak sepenuhnya percaya dengan lulusan SMK dapat bekerja langsung. Atas dasar tersebut rata-rata dari industri ini akan memberikan pelatihan berupa magang atau *training*. Tentu hal tersebut menjadi suatu fakta yang tidak baik mengingat tujuan awal dibentuknya pendidikan vokasi adalah mempersiapkan pekerja yang terampil dan berkompoten. Selanjutnya *soft skill*, mayoritas DUDI mengeluhkan terkait kurangnya *soft skill* lulusan pendidikan vokasi saat ini. *Soft skill* yang dimaksud antara lain seperti kedisiplinan, tanggung jawab terhadap *jobdesk*, *team work*, etika bekerja, integritas, dan daya juang. Dari beberapa *softskill* tersebut, etika bekerja menjadi sorotan utama pada masalah ini. Generasi Z dinilai generasi yang memiliki etika buruk dan memiliki daya juang yang sangat rendah.



GAMBAR 1. Kecocokan industri terhadap CP dan TP Satuan Pendidikan Vokasi di wilayah IKN

d. Kebutuhan materi ajar SPV

Dari hasil FGD, masalah pada aspek ini mengarah kepada kesenjangan antara materi yang diajarkan di sekolah dengan materi sesuai standar industri. Berdasarkan data hasil analisis instrumen *demand-supply* pada Gambar 1,

materi ajar berdasarkan CP dan TP yang ada di SPV sebenarnya diakui dan sangat diperlukan oleh industri. Namun materi tersebut masih sangat kurang untuk dapat memberikan predikat "siap bekerja" ke siswa ketika lulus.

e. Kebutuhan sertifikat kompetensi kerja

Penting bagi institusi pendidikan vokasi untuk terus memperbarui kurikulum mereka dan bekerja sama dengan industri untuk menyediakan sertifikasi kompetensi yang relevan serta berkualitas. Hasil analisis di wilayah IKN, masalah yang dihadapi oleh sekolah vokasi adalah masih kurangnya fasilitas sertifikat kompetensi. Meskipun pemerintah sudah meningkatkan adanya LSP P1 BNSP di SMK untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi, namun jumlah tersebut juga masih terbatas. Dari sekian banyak SMK, hanya beberapa SMK saja yang memiliki LSP P1. Menariknya, terdapat beberapa industri terutama konstruksi yang justru tidak menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP P1 tersebut. Mereka beranggapan bahwa proses asesmen kemampuan siswa seharusnya diuji oleh asesor/penguji dari luar Lembaga itu sendiri. Sehingga industri cenderung menyukai sertifikat dari LSP P3 atau yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga profesional seperti Autodesk, Cisco, Mikrotik, Google, dan sebagainya. Adanya industri yang tidak mau menerima LSP P1 tentunya menjadi bahan evaluasi kedepan sebagai perbaikan skema sertifikasi kompetensi yang lebih baik bagi lulusan Pendidikan vokasi

REKOMENDASI

a. Pengembangan kurikulum berbasis industri yang relevan dengan pengembangan IKN

Melihat dari permasalahan yang ada, nampaknya perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum saat ini supaya sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Industri harus terlibat secara tuntas dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi kurikulum. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan suatu skema atau system kerjasama antara sekolah dan industri agar dapat berkolaborasi untuk update kurikulum secara berkala. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang responsive terhadap perubahan di industri.

b. Peningkatan kerjasama dengan industri dan pemerintah

Kerjasama yang dapat dilakukan salah satunya dengan lebih banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan- perusahaan di sektor unggulan untuk program magang dan praktik kerja bagi siswa. Selain itu juga bekerjasama dengan pemerintah dan industri untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi professional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

c. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan

Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyata dan relevan, maka satuan pendidikan vokasi perlu memiliki fasilitas yang sama dengan industri. Kondisi saat ini tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama dan memadai. Sekolah perlu membangun dan mengembangkan laboratorium serta workshop yang dilengkapi dengan peralatan modern. Selain itu juga membangun pusat inovasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan, dan inkubasi bisnis untuk mendorong kewirausahaan di kalangan siswa. Tentu hal tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah maupun industri, terutama berkaitan dengan pendanaan pengadaan fasilitas. Dalam konteks ini, Direktorat Pendidikan Vokasi dapat membuat kebijakan terkait skema kerjasama antara sekolah dengan industri secara lebih jelas. Tentu sebuah skema kerjasama yang dapat mengikat dan menguntungkan antara kedua belah pihak. Dengan kerjasama tersebut, sekolah diharapkan mendapat tambahan bantuan seperti melalui hibah peralatan industri, program CSR industri, dan sebagainya. Di sisi lain industri juga mendapat keuntungan berupa lulusan sekolah yang siap kerja.

d. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar

Tidak cukup hanya peningkatan dari sisi kurikulum, materi, fasilitas atau infrastruktur. Tenaga pengajar dalam konteks ini guru di SMK, instruktur di LKP, maupun dosen di politeknik juga perlu dilakukan program peningkatan kemampuan dan kapasitas keilmuan. Salah satu caranya dapat melalui

program yang sudah ada seperti *upskilling/reskilling*. Selain itu juga dengan meningkatkan program magang guru. Alternatif lain dapat memberikan pelatihan dan sertifikasi dari industri untuk guru agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri.

e. Pengembangan *soft skill* melalui kurikulum dan pembelajaran

Masalah *soft skill* lulusan atau tenaga kerja menjadi sorotan menarik saat ini. Terutama tenaga kerja dari kalangan Generasi Z (Kelahiran 1997-2012) yang dinilai memiliki *attitude* kurang baik. Dalam hal ini, guru perlu meningkatkan kemampuan *soft skill* melalui pembelajaran di Pendidikan vokasi. Integrasi *soft skill* seperti kedisiplinan, tanggung jawab terhadap *jobdesk*, *team work*, etika bekerja, integritas, dan daya juang perlu dilakukan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan vokasi. Selain itu implementasi budaya kerja industri di sekolah juga sangat penting dan perlu ditingkatkan. Sebagai alternatif lain, kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran seperti seminar, workshop dan pelatihan dari industri juga dapat dilakukan.

f. Pembentukan Tim Kemitraan

Membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengelola dan mengoptimalkan kemitraan dengan industri. Tim ini bisa terdiri dari perwakilan sekolah, industri, dan pemerintah daerah. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara satuan pendidikan dan industri. Memberikan insentif bagi industri yang aktif terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi.

g. Pengembangan program studi baru sesuai sektor unggulan di IKN

Pertambangan dan Penggalian menempati rangking tertinggi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan persentase 23.66%. Diikuti oleh sektor konstruksi dengan 21.75% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 19.41%. Sektor industri dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki persentase secara berurutan sebesar 13.98% dan 8.56%. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan program studi baru perlu untuk dilakukan untuk mempersiapkan suplai tenaga kerja lokal yang relevan dan mendukung pengembangan IKN. Pertama untuk sektor energi terbarukan, yaitu program studi yang fokus pada teknologi energi seperti tenaga surya, biomasa, dan angin. Kedua industri manufaktur, mencakup teknik manufaktur, otomasi, dan manajemen industri. Ketiga pariwisata dan perhotelan, fokus pada manajemen pariwisata, perhotelan, dan layanan wisata. Program studi tersebut perlu untuk disiapkan mengingat besar kemungkinan IKN menjadi destinasi wisata dan pusat pemerintahan di masa depan. Sehingga sektor tersebut pasti akan sangat diperlukan.

REFERENSI

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun (2016) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 68 tahun (2022) tentang Penyelarasan Pendidikan Vokasi
3. Triyono, B et al. (2024). Analisis Keselarasan Satuan Pendidikan Vokasi Dengan Kebutuhan Dunia Kerja di KEK Kendal, IKN, Dan Ekonomi Kreatif Bali. Jakarta. Direktorat MITRAS DUDI Ditjen Vokasi

APENDIKS

PENYELARASAN

SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA (IKN)



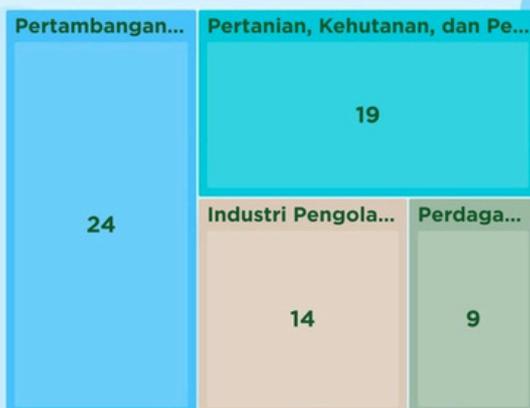
TINGKAT KESELARASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DENGAN DUNIA KERJA/INDUSTRI
DI WILAYAH IKN



KEBUTUHAN JENIS SERTIFIKASI KOMPETENSI TIAP
BIDANG DI WILAYAH IKN



PERINGKAT PDRB DI WILAYAH PENAJAM PASER UTARA
IBU KOTA NUSANTARA



SEKTOR UNGGULAN DI WILAYAH IKN

- 01 **Pertanian dan Perkebunan**
Kelapa Sawit, Karet, dan Tanaman Pangan
- 02 **Perikanan dan Kelautan**
Perikanan Tangkap dan Budidaya serta Industri Pengolahan Ikan
- 03 **Kehutanan**
Kayu dan produk turunannya
- 04 **Pariwisata**
Wisata Alam dan Wisata Budaya
- 05 **Pertambangan dan Energi**
Batubara dan Ebergi Terbarukan
- 06 **Industri Manufaktur**
Kawasan Industri serta Industri Kecil dan Menengah
- 07 **Infrastruktur dan Konstruks**
Pembangunan IKN Nusantara dan daerah penyangganya
- 08 **Jasa dan Perdagangan**
Jasa Keuangan dan Bisnis serta Perdagangan dan Logistik





**PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN
VOKASI DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI
JAWA TENGAH: SEKTOR INDUSTRI KENDAL**

PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH: SEKTOR INDUSTRI KENDAL

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Devi Istiyaningrum

Ketua Tim Kerja Penyelarasan SDM Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Prof. Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Wagiran, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Bayu Rahmat Setiadi, M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta

Galeh Nur Indriatno Putra Pratama, M. Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Ir. Arif Ainur Rafiq, S.T, M.T, M.Sc.

Dosen Jurusan Rekayasa Elektronika dan Mekatronika di Politeknik Negeri Cilacap

Candra Dinata, S.Pd.

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

EDITOR

Muhammad Fauzan Nuri Misbahuddin, S.Pd.

Tim Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini meneliti keselarasan antara satuan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada keselarasan yang signifikan antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemitraan antara satuan pendidikan dan industri. Sektor

industri utama di KEK Kendal meliputi *fashion*, elektronik, otomotif, *furniture*, dan perkantoran, yang semuanya membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi khusus.

Dalam analisis ini, ditemukan bahwa keterlibatan industri dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum sudah berjalan, namun masih perlu peningkatan. Kegiatan pembelajaran telah melibatkan program magang dan guru tamu dari industri, tetapi respons satuan pendidikan terhadap kebutuhan dan masukan industri masih perlu ditingkatkan. Kompetensi pendidik juga memerlukan peningkatan melalui program upskilling dan reskilling yang lebih terstruktur, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar industri masih kurang optimal. Lulusan pendidikan vokasi banyak yang bekerja sesuai bidang keahlian, tetapi ada masalah dalam ketahanan kerja di wilayah KEK Kendal, terutama terkait soft skill seperti komunikasi dan disiplin kerja.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa sektor industri di KEK Kendal memiliki kebutuhan yang spesifik terhadap keterampilan dan kompetensi tertentu. Industri *fashion*, elektronik, otomotif, dan *furniture* memerlukan lulusan yang tidak hanya memiliki hard skill seperti teknis operasional tetapi juga soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Analisis ini menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama

antara satuan pendidikan vokasi dan industri dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal penyediaan sertifikasi kompetensi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar industri.

Kata kunci: Dunia Kerja, Keselarasan, Satuan Pendidikan Vokasi, KEK Kendal .

PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi yang strategis, telah menarik investasi besar dari berbagai sektor industri, termasuk fashion, elektronik, otomotif, furniture, dan perkantoran. KEK Kendal dirancang untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah dengan menawarkan berbagai insentif bagi investor, seperti kemudahan perizinan dan insentif pajak. Namun, keberhasilan kawasan ini sangat tergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.

Masalah keselarasan di Satuan Pendidikan Vokasi menjadi suatu hal yang wajib untuk diperhatikan. Hal tersebut telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun (2016) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perhatian tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 68 tahun (2022) tentang Penyelarasan Pendidikan Vokasi. Cakupan pendidikan vokasi tersebut adalah Satuan Pendidikan Vokasi (SPV) terdiri dari Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), SMK, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia

pada Agustus 2023 mencapai 5,32%, dengan jumlah pengangguran sebesar 7.885.075 orang. Dari data tersebut, lulusan SMK dan pendidikan vokasi memainkan peran besar dalam mengisi lapangan kerja, dengan proporsi lapangan kerja dari SMK sebesar 33,47% dan Diploma I/II/III sebesar 22,75%. Namun, kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan oleh satuan pendidikan vokasi dan kebutuhan nyata di industri masih menjadi tantangan utama. Urgensi dari kajian ini adalah untuk memastikan bahwa satuan pendidikan vokasi di KEK Kendal mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri. Penyelarasan antara kurikulum pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Dengan adanya keselarasan yang baik, diharapkan lulusan pendidikan vokasi dapat langsung berkontribusi di dunia kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di KEK Kendal.

Selain itu, keberhasilan pendidikan vokasi dalam menyelaraskan diri dengan kebutuhan industri juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. KEK Kendal diharapkan dapat menjadi model bagi kawasan ekonomi khusus lainnya di Indonesia dalam mengembangkan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi praktis untuk

meningkatkan keselarasan antara satuan pendidikan vokasi dan dunia kerja, sehingga dapat menciptakan ekosistem pendidikan dan industri yang saling mendukung.

Sasaran kajian adalah keselarasan data dan informasi antara *demand* dan *supply* pendidikan vokasi di wilayah Kendal. Cangkupan subyek kajian adalah Pendidikan Vokasi meliputi PTV, SMK, LKP, dan industri mitra satuan pendidikan vokasi. Untuk tingkat satuan pendidikan vokasi, sasaran adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan DUDI dan lulusan serta pimpinan satuan pendidikan vokasi, sedangkan DUDI diarahkan pada pihak-pihak yang terlibat langsung pengembangan dan rekrutmen sumber daya manusia. Output yang dihasilkan adalah naskah akademik terkait hasil analisis keselarasan *demand* dan *supply* di wilayah KEK yang dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi dan prediksi pemenuhan kebutuhan *demand* dan *supply*. Kajian ini terdiri dari 6 aspek keselarasan yang meliputi:

- Mengkaji data suplai satuan pendidikan vokasi;
- Mengkaji data kebutuhan jabatan kerja pada satuan Pendidikan vokasi;
- Mendapatkan rekomendasi kebutuhan kualifikasi kerja ke depan;

- Mendapatkan informasi kebutuhan *hard skill*, *soft skill*, materi ajar atau kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja;
- Mendapatkan rekomendasi kebutuhan sertifikat kompetensi oleh dunia kerja, dan;
- Mendapatkan informasi sektor unggulan berbasis wilayah yang dibutuhkan oleh industri sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pengembangan pada Satuan Pendidikan Vokasi.

HASIL KAJIAN: POTRET KESELARASAN

a. Keselarasan SPV dengan DUDI

Kurikulum di satuan pendidikan vokasi di KEK Kendal telah melibatkan masukan dari industri, namun masih ada kekurangan dalam hal *update* dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan industri yang dinamis. Banyak industri merasa bahwa kurikulum yang ada belum sepenuhnya mencerminkan keterampilan dan kompetensi terbaru yang dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan lulusan yang dihasilkan kurang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang sebenarnya.

b. Kebutuhan jabatan dan kualifikasi kerja

Pendidik di satuan pendidikan vokasi perlu terus meningkatkan kompetensinya agar sesuai dengan perkembangan industri. Namun, program *upskilling* dan *reskilling*

untuk pendidik masih terbatas dan kurang terstruktur. Tanpa peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, pendidik tidak mampu memberikan pembelajaran yang relevan dan efektif bagi peserta didik, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas lulusan.

c. Kebutuhan *hard skill* dan *soft skill* lulusan SPV

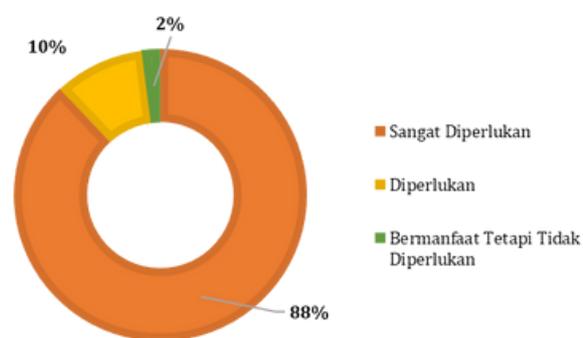
Industri di KEK Kendal sering mengeluhkan kurangnya *soft skill* pada lulusan pendidikan vokasi. Keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, disiplin, dan kemampuan *problem-solving* sangat penting di dunia kerja. Namun, lulusan seringkali hanya memiliki *hard skill* tanpa didukung oleh *soft skill* yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk beradaptasi dan bertahan lama di tempat kerja.

Kebutuhan *hard skill* tenaga kerja di wilayah Kendal dengan keunggulan wilayah dalam bidang produksi dan manufaktur. KEK Kendal memiliki potensial penyerapan tenaga kerja. Sampai saat ini, serapan tenaga kerja sudah mencapai 44.974 orang dengan target 60.000 di tahun 2026. Sebanyak 7.892 lulusan SMK bekerja di kawasan KEK Kendal dan 9.847 orang merupakan pekerja lokal asli Kabupaten Kendal, sedangkan sisanya banyak dari luar Kabupaten Kendal. Minimnya kualifikasi persyaratan yang dapat diterima dari dalam Kabupaten Kendal menyebabkan ketertarikan KEK Kendal untuk merekrut dari luar wilayah tersebut. Adanya syarat utama untuk menguasai Bahasa

Mandarin mengakibatkan serapan tenaga kerja lokal di wilayah KEK Kendal menjadi kurang optimal.

d. Kebutuhan materi ajar SPV

Persiapan dalam menyongsong tenaga kerja yang dapat masuk dalam nominasi kebutuhan rekrutmen tenaga kerja sangat dilandasi dengan muatan materi ajar dan kompetensi yang dikembangkan di satuan pendidikan vokasi.



GAMBAR 1. Kecocokan industri terhadap CP dan TP Satuan Pendidikan Vokasi di wilayah KEK Kendal

e. Kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja

Banyak lulusan vokasi di KEK Kendal tidak bertahan lama di pekerjaan pertama mereka, dengan rata-rata masa kerja kurang dari tiga bulan sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri. Faktor utama penyebab rendahnya ketahanan kerja ini termasuk ketidakcocokan antara ekspektasi kerja dan realitas, serta ketidakpuasan terhadap sistem upah dan kondisi kerja. Ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dan pengenalan dunia kerja yang lebih realistis selama masa pendidikan.

REKOMENDASI

a. Pembaruan Kurikulum Secara Berkala

- Satuan pendidikan vokasi perlu melakukan review dan update kurikulum setiap tahun dengan melibatkan industri untuk memastikan relevansi kurikulum. Pembaruan setiap tahun lebih responsif terhadap perubahan industri tetapi membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak.
- Kolaborasi dengan asosiasi industri memberikan perspektif yang lebih komprehensif, tetapi mungkin memerlukan koordinasi yang lebih kompleks.
- Sebagai alternatif, Pembaruan kurikulum setiap dua tahun untuk mengurangi beban kerja komite kurikulum. Kolaborasi dengan asosiasi industri untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang kebutuhan kompetensi.

b. Program Pelatihan Terstruktur untuk Pendidik

- Mengembangkan program pelatihan terstruktur untuk pendidik, mencakup *upskilling* dan *reskilling*, yang dilakukan setiap enam bulan sekali.
- Kerjasama dengan lembaga pelatihan eksternal untuk menyediakan program pelatihan bagi pendidik.
- Sebagai alternatif, pelatihan online atau melalui LMS yang dapat diakses kapan saja sebagai alternatif untuk pelatihan langsung.

c. Pengadaan Peralatan Baru

- Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan praktik yang sesuai dengan standar industri.
- Memberikan solusi jangka panjang tetapi membutuhkan anggaran yang besar.
- Sebagai alternatif, program pinjam pakai peralatan industri untuk jangka waktu tertentu. Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peralatan memadai. Solusi sementara yang dapat membantu namun mungkin tidak memenuhi kebutuhan jangka panjang

d. Integrasi *Soft skill* dalam Kurikulum

- Integrasikan pengembangan *soft skill* seperti komunikasi, kerja tim, dan *problem-solving* dalam kurikulum pendidikan vokasi.
- Memastikan bahwa pengembangan *soft skill* menjadi bagian dari proses belajar-mengajar, namun memerlukan penyesuaian kurikulum.
- Mengimplementasikan program mentoring dan coaching bagi siswa oleh alumni yang telah sukses di industri.
- Sebagai alternatif, mengadakan *workshop*, pelatihan dan seminar *soft skill* dengan melibatkan praktisi industri.

e. Program Orientasi Karir

- Meluncurkan program orientasi karir untuk memberikan gambaran yang realistis tentang dunia kerja dan ekspektasi industri. Program ini bisa berupa seminar, kunjungan industri, atau simulasi lingkungan kerja.
- Kerjasama dengan industri untuk magang lebih lama sehingga memberikan pengalaman praktis yang lebih dalam tetapi memerlukan komitmen dari industri.
- Sebagai alternatif, mengadakan sesi sharing pengalaman dari alumni yang telah sukses di industri.

Pembentukan Tim Kemitraan

- Bentuk tim khusus yang bertugas untuk mengelola dan mengoptimalkan kemitraan dengan industri. Tim ini bisa terdiri dari perwakilan sekolah, industri, dan pemerintah daerah.
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara satuan pendidikan dan industri.
- Memberikan insentif bagi industri yang aktif terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Pengembangan program studi baru sesuai sektor unggulan di KEK Kendal



GAMBAR 2. Sektor Unggulan di KEK Kendal

Gambar tersebut menampilkan diagram yang mewakili analisis keselarasan antara pendidikan vokasional dan industri di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (KEK Kendal). Terdapat sektor-sektor unggulan yang menjadi fokus pengembangan, yaitu: Energi Terbarukan, Manufaktur, Logistik dan

Perdagangan, Makanan dan Minuman, Pariwisata dan Perhotelan, Kimia dan Farmasi, *Furniture*, dan Tekstil dan Pakaian Jadi. Diagram ini relevan karena secara visual merangkum sektor industri strategis yang sejalan dengan upaya pendidikan vokasional di KEK Kendal, menyoroti potensi area untuk pengembangan ekonomi dan fokus pendidikan

REFERENSI

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun (2016) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 68 tahun (2022) tentang Penyelarasan Pendidikan Vokasi
3. Triyono, B et al. (2024). Analisis Keselarasan Satuan Pendidikan Vokasi Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Di KEK Kendal, IKN, Dan Ekonomi Kreatif Bali. Jakarta. Direktorat MITRAS DUDI Ditjen Vokasi

APENDIKS

PENYELARASAN

SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA
DI PROVINSI JAWA TENGAH: SEKTOR INDUSTRI KENDAL



TINGKAT KESELARASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA/INDUSTRI DI WILAYAH KENDAL



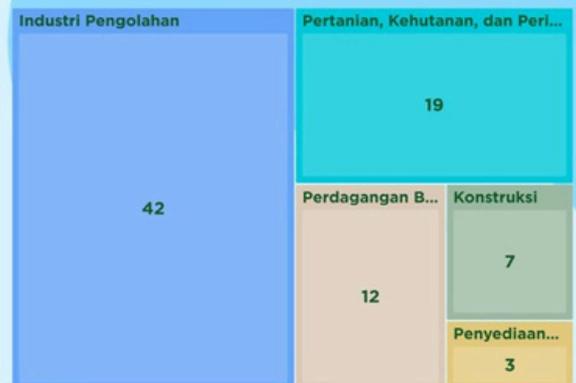
KEBUTUHAN JENIS SERTIFIKASI KOMPETENSI TIAP BIDANG DI WILAYAH KENDAL



SEKTOR UNGGULAN DI WILAYAH KENDAL

- 01 Manufaktur**
Tekstil dan Garmen, Elektronik, serta Otomotif
- 02 Logistik dan Pergudangan**
Fasilitas logistik dan pergudangan yang modern
- 03 Makanan dan Minuman**
Industri pengelolaan makanan
- 04 Kimia dan Farmasi**
Produksi berbagai bahan kimia, obat-obatan, dan produk farmasi
- 05 Furniture**
Ekspor produk furniture
- 06 Energi Terbarukan**
Pembangkit listrik tenaga surya dan energi lainnya yang ramah lingkungan
- 07 Pariwisata dan Perhotelan**
Pembangunan fasilitas wisata dan hotel yang mendukung kegiatan bisnis dan leisure

PERINGKAT PDRB DI WILAYAH KENDAL





**PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI
DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

PENYELARASAN SATUAN PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA KERJA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Fuat Iskandar

Penelaah Teknis Kebijakan di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Erikson Togatorop, S.S., M.Pd., Ph.D

Dosen Jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Batam

Himawan Mochtoha, S.Tr.AB., M.B.A

Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Terapan di Politeknik Negeri Batam

Sapto Wiratno Satoto, S.T., M.T.

Dosen Jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan di Politeknik Negeri Batam

Noper Ardi, S.Pd., M.Eng

Dosen Jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Batam

Alrido Martha Devano, S.T., M.A.B

Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Terapan di Politeknik Negeri Batam

Hanifah Widiastuti, Ph.D

Dosen Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Batam

Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc

Dosen Jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia di Politeknik Negeri Batam

Agus Supriyadi, S.Tr.AB., M.A.B

Dosen Jurusan Manajemen Bisnis di Politeknik Negeri Batam

Yulfiana Harini, S.Tr.T

Laboran Jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Batam

Widya Putri Ramadhani, S.Tr.Kom

Dosen Jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Batam

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan antara satuan pendidikan vokasi (SPV) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di Provinsi Kepulauan Riau. Menggunakan metode campuran (mixed methods), penelitian ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari SMK, Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), Lembaga Kursus dan Pelatihan

(LKP), serta mitra industri di tujuh kabupaten/kota. Kajian ini dilakukan untuk menjawab tantangan kesenjangan antara penyiapan tenaga kerja dan kebutuhan industri yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang cepat dan masif.

Analisis keselarasan satuan pendidikan vokasi dengan mitra industri di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan variasi yang signifikan, baik antar elemen maupun antar daerah. Elemen pembelajaran di PTV mencapai tingkat keselarasan tertinggi (3,95 - selaras), sementara kemitraan menjadi elemen terendah (2,51 - cukup selaras) secara keseluruhan. Dari perspektif SMK, pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan keselarasan tertinggi, sedangkan sarana-prasarana terendah. PTV menunjukkan keunggulan dalam pembelajaran namun lemah dalam kemitraan, sementara LKP unggul dalam aspek peserta didik namun juga lemah dalam kemitraan. Secara geografis, Kota Tanjungpinang memimpin dengan tingkat keselarasan tertinggi (3,19 - selaras) untuk keseluruhan SPV, sementara Kabupaten Kepulauan Anambas berada di posisi terendah (2,51 - cukup selaras). Temuan ini menggarisbawahi perlunya strategi yang disesuaikan untuk meningkatkan keselarasan di berbagai aspek dan wilayah.

Perbandingan dengan data tracer study mengungkapkan bahwa tingkat keselarasan hasil riset

umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan keselarasan riil antara kompetensi lulusan dan pekerjaan mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara persepsi keselarasan dan realitas di lapangan, yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan dan program pendidikan vokasi di masa depan.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Bagi SPV, fokus utama adalah penguatan kemitraan dengan industri, peningkatan sarana prasarana (terutama untuk SMK), dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Bagi dunia industri, rekomendasi utama meliputi pembentukan konsorsium industri untuk pendidikan vokasi di setiap wilayah, pelaksanaan program "Adopsi Laboratorium" untuk meningkatkan kualitas sarana praktik, serta inisiasi program "Mentorship Industri" untuk memberikan bimbingan karier jangka panjang bagi mahasiswa vokasi.

Kata kunci: Keselarasan, Satuan Pendidikan Vokasi, Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi Vokasi, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kepulauan Riau, Mitra Dunia Usaha Dunia Industri

PENDAHULUAN

Pengembangan sekolah vokasi dilakukan dalam beberapa cara di antaranya adalah dengan kegiatan revitalisasi dan pelatihan pengajar vokasi (Alhumami, 2021). Dalam proses revitalisasi tersebut, terdapat potensi kesenjangan antara penyiapan tenaga kerja dan kecakapan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), yang terjadi karena antara lain karena perkembangan teknologi yang cepat dan masif yang tidak disertai dengan pengembangan yang merata di seluruh instansi pendidikan. Studi ini merumuskan permasalahan utama penelitian yang menjadi landasan dalam penentuan kebijakan terkait penyelarasan pendidikan vokasi dengan DUDI yakni bagaimana keselarasan satuan pendidikan vokasi (SPV) dengan dunia kerja dunia industri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan ini memerlukan suatu analisis keselarasan diantara usaha-usaha penyiapan tenaga kerja di institusi-institusi SPV dan tenaga kerja yang dibutuhkan di DUDI.

Ketidakselarasan keterampilan terjadi ketika keterampilan (skills) yang dimiliki oleh tenaga kerja yang tersedia, tidak dapat memenuhi tuntutan ekonomi yang berubah dengan cepat, sehingga menciptakan tantangan besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Ketidakselarasan keterampilan sering kali dianggap sebagai penyebab kesulitan mendapatkan pekerjaan di satu sisi dan kesulitan mendapatkan tenaga terampil yang dibutuhkan di sisi lain. Situasi ini berpotensi menyebabkan meningkatnya pengangguran yang pada akhirnya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakselarasan antara keterampilan yang ditawarkan dan keterampilan yang dibutuhkan merupakan hasil interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).

a. Sasaran/Output

Sasaran dari penelitian ini adalah terukurnya tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi dengan mitra dunia usaha dunia industri di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Spesifikasi Teknis

Kajian ini memberikan gambaran terkait level keselarasan satuan pendidikan vokasi dengan mitra DUDI yakni sebagai berikut :

- Tingkat keselarasan SPV dengan industri di wilayah Kepulauan Riau
- Gambaran terkait tingkat kesesuaian Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran SMK dengan mitra DUDI

- Gambaran terkait tingkat kesesuaian Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran PTV dengan mitra DUDI
- Kompetensi penting *hard skills* dan *soft skills* yang dibutuhkan oleh industri
- Jabatan Kerja yang dibutuhkan oleh mitra DUDI
- Komparatif analisis keselarasan SPV dengan mitra DUDI di wilayah Kepulauan Riau dengan Data *Tracer Study*
- Komparatif analisis keselarasan SPV dengan mitra DUDI di wilayah Kepulauan Riau dengan Data PDRB

DESKRIPSI MASALAH

Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, tingkat keselarasan SPV dengan Mitra Industri di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Terdapat keselarasan yang cukup baik antara Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dan mitra industri dengan nilai tertinggi pada elemen pembelajaran (3,95), namun elemen kemitraan memiliki keselarasan terendah (2,51).
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan keselarasan tertinggi pada elemen pendidik dan tenaga kependidikan (3,26) dan terendah pada sarana-prasarana (2,17).
- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memiliki keselarasan tertinggi pada peserta didik (2,82) dan terendah pada kemitraan (2,19).

Tingkat kesesuaian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran SMK dengan Mitra DUDI Vokasi menunjukkan hasil mendekati 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk sekolah vokasi, data dari hasil kesesuaian CP / TP menunjukkan bahwa hasilnya sudah mendekati 100%.

Kajian ini mengidentifikasi kompetensi penting yang dibutuhkan oleh industri baik *hard skills* maupun *soft skills*. Kompetensi *hard skills* yang teridentifikasi berdasarkan sektor dapat dilihat pada Apendiks, sementara kompetensi *soft skills* yang teridentifikasi secara garis besar ialah kemampuan komunikasi aktif, kemampuan bahasa asing (terutama bahasa Inggris), kemampuan bekerja dalam tim, inisiatif dan mau belajar, kemampuan bekerja dalam lingkungan yang berbeda budaya, serta pengetahuan tentang K3LH dan budaya kerja.

Keselarasan yang diperoleh di kajian ini adalah self-assessment dari SPV, lalu dibandingkan dengan penilaian mitranya. Secara umum tingkat keselarasan pekerjaan alumni dengan kompetensi yang didapat dari riset ini lebih tinggi dibanding dengan keselarasan yang diperoleh dari hasil *tracer study*. Hanya Kabupaten Karimun yang tingkat keselarasan hasil riset ini lebih rendah dibandingkan keselarasan di *tracer study*. Sektor keunggulan di

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan PDRB terdiri dari 5 sektor, secara berurutan yaitu industri pengolahan; konstruksi; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

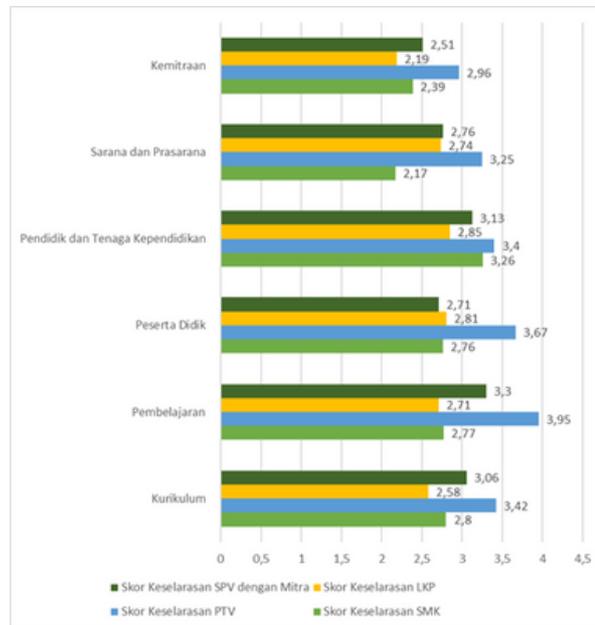
REKOMENDASI

- a. Penguatan Kerja Sama SPV-DUDI: Memperkuat kolaborasi antara SPV dan DUDI dapat meningkatkan relevansi program pelatihan. Implementasi program magang dan pelatihan berbasis industri adalah salah satu opsi yang dapat dilakukan.
- b. Revisi Kurikulum: Menyusun ulang kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri melalui keterlibatan aktif dari pelaku industri dalam proses perumusan dan evaluasi kurikulum.
- c. Peningkatan Kompetensi Guru: Memberikan pelatihan tambahan bagi guru vokasi untuk memastikan mereka memiliki keterampilan terkini yang sesuai dengan perkembangan industri.
- d. Rekomendasi Kebijakan: Pembentukan Forum Kolaboratif: Mendirikan forum kolaboratif antara pemerintah daerah, SPV, dan DUDI untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan menyusun strategi pengembangan program pendidikan vokasi.
- e. Program Magang Terstruktur: Mengembangkan program magang terstruktur yang wajib bagi siswa SPV, bekerja sama dengan DUDI untuk memberikan pengalaman kerja nyata yang relevan.
- f. Inovasi Kurikulum Berbasis Industri: Melakukan revisi kurikulum secara berkala berdasarkan umpan balik dari industri dan tren pasar kerja untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan.
- g. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program keselarasan SPV dan DUDI untuk mengukur efektivitas dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.

APENDIKS (optional)



Gambar Diagram Radar Tingkat Keselarasan SPV untuk Setiap Dimensi



Gambar Perbandingan Tingkat Keselarasan Hasil Riset dengan *Tracer Study*



REFERENSI

- Alhumami, A. (2021). Kebijakan dan Strategi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Kementerian PPN/Baooenas, September
- Asian Development Bank. (2020). *Developing Skills for Economic Transformation and Social Harmony in Southeast Asia*. ADB Publishing.
- Autor, D., & Dorn, D. (2013). *The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market*. American Economic Review, 103(5), 1553-1597.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
- Cedefop. (2019). *European Skills Index. European Centre for the Development of Vocational Training*.
- Kementerian Pendidikan kebudayaan dan Teknologi. (2022). Naskah Akademik Peta Jalan Pendidikan Vokasi 2023-2030.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mix methods approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson.
- Euler, D. (2013). *Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries?* GIZ.
- Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
- McKinsey Global Institute. (2018). *Skills Shift: Automation and the Future of the Workforce*. McKinsey & Company.
- OECD. (2019). *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World*. OECD Publishing.
- Robles, M. M. (2012). *Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today's Workplace*. Business Communication Quarterly.
- World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. World Economic Forum.



**ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN TINGGI
VOKASI TERHADAP POTENSI WILAYAH DI
PROVINSI BALI (KEK SANUR DAN KEK KURA-KURA)**

ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI TERHADAP POTENSI WILAYAH DI PROVINSI BALI (KEK SANUR DAN KEK KURA-KURA)

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dini Pratiwindya

Pengembang Teknologi Pembelajaran di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.

Lektor Kepala Jurusan S2 Manajemen di Universitas Brawijaya

Radityo Putro Handrito, S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Kewirausahaan di Universitas Brawijaya

Tufiq Ismail, S.S., S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Dr. Christin Susilowati, S.E., M.Si.

Lektor Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Nugroho Suryo Bintoro, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.

Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Prasetya Putra Dewanta, SE., M.Buss.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Muhammad Faathir

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Renata Damayanti, SE

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Anindita Ajeng Prililantyas, SE.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tingginya tingkat keselarasan profil Pendidikan vokasi dan potensi ekonomi wilayah merupakan hasil dari proses panjang perkembangan industri pariwisata di provinsi Bali yang diusung bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan sektor swasta baik dalam maupun luar negeri. Kondusifnya iklim industri pariwisata baik secara ekonomis maupun geografis memiliki daya perekat kuat bagi institusi pendidikan vokasi untuk aktif dalam menghasilkan lulusan pendidikan vokasi (SMK, Politeknik, dan Lembaga Pelatihan dan Kursus) yang memenuhi standar sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk lintas pemerintah daerah (Kota Denpasar, Kabupaten Badung,

Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar) yang terjadi menjamin keberlanjutan pendidikan vokasi dengan potensi ekonomi di Provinsi Bali. Catatan khusus untuk Kabupaten Tabanan yang potensi ekonominya lebih pada sektor pertanian, diharapkan ada SMK unggulan yang bisa mendorong minat melestarikan sawah produktif yang masuk dalam warisan budaya UNESCO di daerah Jatiluwih dengan terarising dan sistem pengarian subak yang ikonik tersebut. Penerapan keselarasan ideal di Provinsi Bali dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dengan potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

PENDAHULUAN

Tujuan utama institusi pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembelajaran, tetapi juga untuk mempersiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi, kesiapan, dan keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional (Kemendikbud, 2019). Tujuan ini memiliki dampak signifikan bagi para pemangku kepentingan, seperti institusi pendidikan, orang tua, siswa, dan DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018). Pendidikan vokasi di Indonesia mencakup pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Politeknik, Akademi, Institut, dan Lembaga Pelatihan dan Kursus. Berbagai jenjang dan program

vokasional tersebut disediakan oleh pemerintah maupun swasta sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja dan memenuhi standar DUDI.

Pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk sektor-sektor yang penting untuk perkembangan ekonomi suatu negara. Industri pariwisata berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian dengan cara menciptakan lapangan kerja, mendatangkan investasi, memberikan nilai tambah pada komoditas, bahkan mendatangkan devisa bagi sebuah negara. Sebelum pandemi, dalam kurun waktu 2014-2019, OECD menunjukkan bahwa pariwisata internasional menghasilkan lebih dari 8,9 triliun USD pada perekonomian dunia. Ekonomi kreatif juga menggerakkan pertukaran budaya dengan memberikan ruang bagi seniman dan kreator untuk berbagi karyanya di tingkat global, mempertahankan budaya dan pertukaran budaya. Secara umum, industri pariwisata dan ekonomi kreatif adalah komponen-komponen yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara, berkontribusi terhadap PDB, pengangguran, pertahankan budaya, inovasi, dan keberlanjutan. Dengan potensi yang demikian besar, tidak heran jika pemerintah Indonesia menetapkan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas dalam pembangunan di masa depan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura dan KEK Sanur merupakan kawasan yang dibangun untuk menguatkan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Bali. Perkembangan KEK Sanur dan KEK Kura-kura serta industri penunjangnya, pemerintah daerah yang berada di sekitar wilayah dua KEK menjadi aktor penting dan kerjasama di antara mereka merupakan kunci utama. Akan tetapi, salah satu faktor penting untuk memastikan keberlanjutan dua wilayah KEK tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk mendukung perkembangan KEK Sanur dan KEK Kura-kura serta industri penunjangnya, pemerintah daerah yang berada di sekitar wilayah dua KEK menjadi faktor penting dan kerjasama di antara mereka merupakan kunci utama. Akan tetapi, salah satu faktor penting untuk memastikan keberlanjutan dua wilayah KEK tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil. Dalam hal ini, pendidikan vokasi memiliki peranan yang vital. Dengan potensi ekonomi utama di sektor pariwisata serta industri turunannya, empat wilayah di sekitar KEK Sanur dan KEK Kura-kura (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan) memiliki karakteristik potensi ekonomi yang bervariasi.

Analisis deskripsi kualitatif digunakan untuk melihat karakter dominan, sebaran dimensi, anomali data, dan perbandingan kualitas dan karakteristik pendidikan vokasi di Kabupaten Pulau Morotai dalam upaya mendukung potensi wilayah. Analisis spektrum warna merupakan analisis visual dengan bantuan warna untuk melihat keselarasan antara potensi ekonomi wilayah. Analisis spektrum warna dan kajian geografis sebagai penunjang analisis dan penyajian data, kajian ini juga dilengkapi dengan analisis geografis menggunakan ArcGIS agar dapat membantu visualisasi dan pemetaan wilayah berdasarkan potensi wilayah dan profil pendidikan vokasi. Dalam kajian ini, data PDRB sektoral di setiap wilayah dipilih menjadi indikator utama dalam keselarasan terhadap profil pendidikan vokasi di wilayah tersebut. Keselarasan antara profil pendidikan vokasi terhadap profil ekonomi daerah menunjukkan ketersediaan tenaga kerja pada industri yang paling berkembang di suatu wilayah.

IDENTIFIKASI MASALAH

Perkembangan KEK Sanur dan KEK Kura-kura serta industri penunjangnya tidak terlepas dari pemerintah daerah yang berada di sekitar wilayah tersebut. Kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi aktor penting dalam perkembangan wilayah tersebut.. Akan tetapi, salah satu faktor penting untuk memastikan keberlanjutan dua wilayah KEK tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil. Dalam hal ini, pendidikan vokasi memiliki peranan yang vital. Dengan potensi ekonomi utama di sektor pariwisata serta industri turunannya, empat wilayah di sekitar KEK Sanur dan KEK Kura-kura (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan) memiliki karakteristik potensi ekonomi yang bervariasi.

Berdasarkan analisis data, keselarasan antara potensi ekonomi Kota Denpasar terhadap profil pendidikan vokasi dapat disimpulkan tinggi. Dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai sektor ekonomi unggulan, Kota Denpasar telah didukung dengan keberadaan sekolah vokasi yang mayoritas menawarkan pendidikan kejuruan di bidang perhotelan, kuliner, dan usaha wisata. Keselarasan ini dapat dimaknai ketersediaan tenaga kerja terampil dalam industri terkait.

Sementara itu, Kabupaten Badung juga memiliki potensi ekonomi di sektor perdagangan dan konstruksi terutama hotel dan infrastruktur penunjang sektor pariwisata. Selain itu, jika dilihat dari profil pendidikan vokasinya, Kabupaten Badung didominasi oleh jurusan yang telah relevan dengan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Begitu pula dengan sebaran lokasi pendidikan vokasinya yang relatif merata di wilayah utara dan wilayah selatan serta dekat dengan pusat-pusat pariwisata. Wilayah ketiga yang mendukung KEK Sanur dan KEK Kura – Kura yaitu Kabupaten Tabanan yang profil potensi ekonominya memang sedikit berbeda dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dengan luas wilayah yang lebih kecil, potensi ekonomi terbesar Kabupaten Tabanan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Potensi ekonomi tersebut sudah selaras dengan profil pendidikan vokasinya; mayoritas di KK yang relevan dengan industri kuliner. Selain itu, jurusan TKJ, Akuntansi, dan konstruksi juga selaras dengan profil ekonomi daerah. Akan tetapi, sebaran wilayah pendidikan vokasinya masih belum merata di seluruh daerah. Hal ini menjadi potensi pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Tabanan.

Dibandingkan tiga wilayah lain, Kabupaten Gianyar termasuk memiliki wilayah yang paling luas dan melingkupi tepi pantai serta pegunungan serta membentang dari utara ke selatan Propinsi Bali. Secara umum, keselarasan potensi ekonomi daerah dan profil pendidikan vokasi di Kabupaten Gianyar juga termasuk tinggi dengan sektor pariwisata sebagai pemimpinnya. Akan tetapi, sebaran pendidikan vokasi di Kabupaten Gianyar termasuk rendah karena terpusat di wilayah selatan. Selain itu, hanya ada satu pendidikan tinggi dengan jurusan vokasi di Kabupaten Gianyar. Namun hal ini tidak menjadi masalah besar mengingat mobilitas masyarakat antar wilayah dan infrastruktur relatif baik.

Masalah umum yang terjadi di Propinsi Bali, khususnya di empat wilayah ini adalah kecenderungan brain drain tenaga lokal yang terlatih.

Mayoritas tenaga kerja terampil dan berpendidikan serta bersertifikasi memilih untuk berkarir di luar negeri karena jaminan kesejahteraan yang lebih baik serta gengsi sosial yang lebih tinggi. Hal ini membawa dampak pada ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan berstandar internasional menjadi rendah. Meskipun menurut Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, komposisi tenaga kerja di Kota Denpasar sampai tahun 2023 terdiri dari 75% masyarakat lokal Propinsi Bali dan 25% berasal dari masyarakat luar Propinsi Bali, ketersediaan tenaga kerja dengan kualitas tinggi masih terbatas akibat fenomena brain drain tersebut. Bahkan untuk tenaga kasar seperti tukang, kebutuhannya dipenuhi dari luar Propinsi Bali, terutama dari Pulau Jawa. Hal ini merupakan tantangan bagi para pemangku kebijakan di Propinsi Bali.

REKOMENDASI

Berikut beberapa rekomendasi yang terkait dengan Pendidikan vokasi di KEK Sanur dan KEK Kura-Kura:

1. Di luar pendidikan formal, pemerintah perlu melakukan optimalisasi fasilitas pendukung berupa gedung dan program-program pelatihan keterampilan yang mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif, baik bagi peserta yang berminat untuk bekerja di perusahaan maupun bagi mereka yang berminat berwirausaha.
2. Lembaga-lembaga kursus dan pelatihan memang lebih menarik bagi banyak calon tenaga kerja karena masa pendidikan yang relatif singkat, 3-6 Bulan, dan sudah terjamin ikatan kerja dengan DUDI baik di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan lembaga ini di satu sisi dapat dimaknai positif karena menambah pasokan tenaga kerja terlatih. Akan tetapi di sisi lain juga menjadi ancaman bagi Pendidikan formal seperti SMK dan PTK yang secara umum membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memperoleh gelar serta keterampilan. Bisa jadi ada kemungkinan untuk menggandeng LKP yang berstandar bagus dan bereputasi internasional akan lebih mengoptimalkan sinergi ini.
3. Berdasarkan peninjauan terhadap profil keselarasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keselarasan potensi ekonomi daerah dan profil pendidikan vokasi di Propinsi Bali sangat tinggi. Namun demikian, bukan berarti setiap program yang dilakukan oleh pendidikan vokasi di Propinsi Bali dapat diterapkan langsung di wilayah lain. Perlu kebijakan khusus dalam adopsi program di Propinsi Bali karena keberadaan dan kedewasaan sektor pariwisatanya jauh lebih baik dibanding wilayah pariwisata lain di Indonesia. Hal menarik yang menjadi catatan penting adalah peluang mengembangkan SMK yang berpusat pada keunggulan pertanian untuk menjawab kebutuhan Warisan Budaya UNESCO di daerah Jatiluwih – Tabanan sebagai salah satu rujukan *best-practice* untuk sinergi lintas industri.

REFERENSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kemendikbud.

OECD (2014), *Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264207875-en>*.

Siswanto, A., & Widyastuti, T. (2018). Peningkatan Kualitas *Output* SMK Melalui Program Magang Berbasis Sekolah di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 201-212.



**ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI
TERHADAP POTENSI EKONOMI DI DERAH
WILAYAH IKN**

ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI TERHADAP POTENSI EKONOMI DI DERAH WILAYAH IKN

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Nursyahwa Islamia Hafidzuddin

Tim Teknis di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.

Lektor Kepala Jurusan S2 Manajemen di Universitas Brawijaya

Radityo Putro Handrito, S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Kewirausahaan di Universitas Brawijaya

Tufiq Ismail, S.S., S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Dr. Christin Susilowati, S.E., M.Si.

Lektor Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Nugroho Suryo Bintoro, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.

Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Prasetya Putra Dewanta, SE., M.Buss.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Muhammad Faathir

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Renata Damayanti, SE

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Anindita Ajeng Prililantyas, SE.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi peluang besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berada di wilayah penyangga IKN atau di sebut wilayah serambi IKN, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarindah, Kabupaten Panajam Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi, IKN akan membutuhkan tenaga kerja terampil dan berpendidikan vokasi yang sangat banyak untuk mendukung berbagai sektor, sesuai dengan tahapan pembangunan IKN. Hal ini menjadi peluang besar para lulusan Pendidikan vokasi yang memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan DUDI disetiap sektor dan di setiap tahapan pembangunan IKN.

Kolaborasi antar empat wilayah pendukung IKN (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara) menjadi kunci keberhasilan bagi Otorita IKN dalam mengendalikan pembangunan dan operasionalisasi IKN. Karena pembangunan IKN merupakan proyek nasional strategis yang berskala besar, memerlukan sumber daya dan kolaborasi lintas sektoral. Faktor krusial dalam keberhasilan IKN meliputi infrastruktur, investasi, dan kepastian hukum. Namun, sektor lain seperti pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, juga perlu dikembangkan secara simultan untuk mencegah ketertinggalan, terutama di empat daerah serambi IKN. Pendidikan vokasi sangat vital dalam menyediakan tenaga kerja terdidik dan terlatih di IKN, yang akan mendukung perekonomian dan keberlangsungan wilayah tersebut di masa depan.

Dari empat daerah di wilayah serambi IKN, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki lulusan SMK yang cukup selaras dengan kebutuhan DUDI daerah dalam menunjang perekonomian daerah. Saat ini lulusan vokasi pada tingkat Perguruan Tinggi di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan mempunyai ketrampilan dibidang kesehatan, tekhnik, pertanian dan bisnis. Sedangkan lulusan vokasi pada tingkat SMK, mempunyai konsentrasi keahlian di bidang

akuntansi, desain komunikasi visual, teknik komputer dan jaringan, manajemen perkantoran dan bisnis digital, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak dan teknik pengelasan, kuliner; teknik konstruksi dan perumahan yang telah dihasilkan di empat daerah tersebut. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga vokasi di IKN, keahlian-keahlian tersebut perlu standarisasi kompetensi, agar standar kualitas kompetensi kelulusan SMK di empat daerah tersebut yang dapat memenuhi standar kualitas kompetensi yang dibutuhkan IKN. Selain itu peluang kebutuhan lulusan vokasi pada setiap tahapan pembangunan IKN dapat menjadi perhatian Provinsi Kalimantan Timur dalam menyiapkan putra daerah yang berpendidikan vokasi untuk ikut berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan IKN. Kesiapan tersebut dapat meningkatkan peran aktif putra daerah dalam pembangunan IKN dan mengurangi migrasi penduduk dari luar daerah ke IKN.

Kata kunci: IKN, Pendidikan Vokasi, Potensi Ekonomi

PENDAHULUAN

Tujuan utama institusi pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembelajaran, tetapi juga untuk mempersiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi, kesiapan, dan keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional (Kemendikbud, 2019). Tujuan ini memiliki dampak signifikan bagi para pemangku kepentingan, seperti institusi pendidikan, orang tua, siswa, dan DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018). Oleh karena itu, keselarasan kompetensi peserta didik serta lulusan terhadap kebutuhan DUDI menjadi parameter penting terhadap efektivitas pembelajaran. Namun, masalah klasik dunia pendidikan terkait serapan tenaga kerja pada DUDI masih menjadi tantangan berat bagi institusi pendidikan, tidak terkecuali bagi pendidikan vokasi.

Pada jenjang SMK, pemerintah telah menawarkan 128 konsentrasi keahlian (KK) (Kemendikbud, 2020; Dapodik 2022) yang dapat dipilih oleh siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam menghadapi dunia kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi (D1, D2, D3, dan D4), pemerintah telah mendirikan Politeknik, Akademi, dan Institut dengan berbagai macam penjurusan dan keterampilan.

Sedangkan bagi pendidikan non-gelar, pemerintah mengizinkan pendirian lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang memberikan pelatihan khusus pada keterampilan tertentu. Namun, berbagai konsentrasi keahlian dan pelatihan yang ditawarkan ternyata belum optimal dalam mengatasi tantangan kebutuhan DUDI. Salah satu penyebab yang diduga terlupakan dalam analisis keselarasan adalah faktor penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja serta potensi ekonomi daerah. Sementara itu, permintaan tenaga kerja oleh DUDI terus bertambah seiring bertumbuhnya perekonomian nasional. Selain itu, angkatan kerja yang semakin banyak (bonus demografi) membuat persaingan kerja juga semakin meningkat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki berbagai tujuan strategis, selain pengembangan wilayah tertinggal, IKN juga diharapkan menjadi pusat administrasi pemerintahan yang efisien dan modern, yang berdaya saing dan menciptakan citra negara. Selain itu keberadaan IKN diharapkan dapat menjadi perangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar IKN, yang meliputi pengembangan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peluang investasi.

Wilayah IKN berada diantara empat daerah yang sering dikatakan Serambi IKN, daerah tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Panajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu keberadaan IKN diperlukan kolaborasi antar empat wilayah pendukung IKN dalam pelaksanaan pembangunan dan operasonalisasi IKN, terutama terkait kebutuhan tenaga kerja vokasi.

Kebutuhan tenaga kerja vokasi dalam pelaksanaan pembangunan dan operasional IKN harus menyesuaikan dengan tahapan pembangunan IKN dan kebutuhan Kompetensi Keahlian (KK) disetiap tahapan pembangunan IKN. Tahapan pembangunan IKN sudah sampai pada tahapan pembangunan infrastruktur dasar yang direncanakan pada tahun 2024 – 2027 meliputi konstruksi jalan raya utama, sistem transportasi publik, dan jaringan utilitas (listrik, air, sanitasi). Selanjutnya pembangunan zonasi dan pembangunan perumahan direncanakan di tahun 2025 -2028, yang meliputi pembangunan zonasi perumahan, pusat bisnis, industri, dan area hijau. Sedangkan pembangunan fasilitas publik dan layanan direncanakan tahun 2026 – 2030, yang meliputi pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman kota, dan pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan kebudayaan yang memadai untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi IKN.

Pada tahun 2035 – 2045 direncanakan pembangunan infrastuktur dan ekosistem Tiga Kota IKN – Samarinda – Balikpapan, pembangunan jaringan utilitas, pengembangan pusat inovasi dan talenta. Tahun 2045 – selanjutnya, IKN diharapkan menjadi kota berdaya saing dan layak huni terbaik, mencapai *net-zero-carbon-emission*, penerapan 100% energi terbarukan.

Memperhatikan tahapan pembangunan IKN di atas tampak kebutuhan tenaga kerja vokasi dengan Konsentrasi Keahlian yang sesuai, dimana kebutuhan tersebut diharapkan dapat terpenuhi lebih dahulu oleh daerah penyangga IKN yang saat ini telah memiliki sekolah Pendidikan vokasi baik tingkat SMK, Perguruan Tinggi dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Untuk itu perlu dikaji profil Pendidikan vokasi di masing-masing daerah wilayah IKN saat ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah tersebut. Pendidikan vokasi yang selaras dengan dunia usaha dan dunia industri di masing-masing daerah akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerahnya. Kajian ini menggunakan analisis deskripsi kualitatif untuk melihat karakteristik pendidikan vokasi di daerah Wilayah IKN dalam upaya mendukung potensi daerah.

Kajian ini juga dilengkapi dengan analisis geografis menggunakan ArcGIS agar dapat membantu visualisasi dan pemetaan wilayah berdasarkan potensi wilayah dan profil pendidikan vokasi. Dalam kajian ini, data PDRB sektoral di setiap wilayah dipilih menjadi indikator utama dalam keselarasan terhadap profil pendidikan vokasi di wilayah tersebut. Keselarasan antara profil pendidikan vokasi terhadap profil ekonomi daerah menunjukkan ketersediaan tenaga kerja pada industri yang paling berkembang di suatu wilayah.

DESKRIPSI MASALAH

Kota Samarindah adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan Kota strategis dalam menunjang pembangunan dan operasional IKN. Pertumbuhan ekonomi Kota Samarindah mayoritas ditunjang oleh potensi ekonomi di bidang konstruksi, perdagangan, dan pertambangan. Adapun pendidikan vokasi pada jenjang SMK, lima besar Konsentrasi Keahlian yang banyak ditawarkan dan ditempuh oleh siswa SMK adalah akuntansi, desain komunikasi visual, teknik komputer dan jaringan, manajemen perkantoran dan bisnis digital. Meskipun keahlian di Konsentrasi Keahlian tersebut juga diperlukan di sektor konstruksi, perdagangan, dan pertambangan,

namun jumlah lapangan kerja yang dapat diserap atau potensi berwirausaha dengan kemampuan jurusan tersebut dapat dikatakan rendah, sehingga Konsentrasi Keahlian yang dimiliki tenaga kerja lokal setara SMK yang sangat dibutuhkan DUDI di Kota Samarindah yang selaras dengan sektor pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Sedangkan pada tingkat Pendidikan Tinggi, Program Studi yang mendominasi adalah Kesehatan, Pertanian, dan Teknik. Ketidak selarasan kompetensi lulusan pendidikan vokasi di Kota Samarindah saat ini menjadi peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang di butuhkan IKN.

Kota Balikpapan adalah Kota terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Timur, dimana pertumbuhan ekonominya diperkuat oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, serta jasa keuangan dan asuransi. Sedangkan lulusan pendidikan vokasi di Kota Balikpapan lebih diwarnai oleh lulusan SMK yang Konsentrasi Keahliannya relatif selaras dengan sektor ekonomi, yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak dan teknik pengelasan.

Pada tingkat Perguruan Tinggi, jumlah Lembaga Pendidikan tidak sebanyak Kota Samarindah, dan Program Studi yang mendominasi adalah Kesehatan dan Teknik. Profil pendidikan vokasi di Kota Balikpapan saat ini sangat mendukung kebutuhan DUDI lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, sehingga untuk pengembangan ekonomi daerah sebagai dampak adanya IKN, kebutuhan tenaga vokasi yang selaras dapat terpenuhi.

Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) adalah salah satu dari 10 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, dimana Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU ditetapkan sebagai kawasan ini Kota Nusantara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU didukung oleh lima sektor besar, yaitu pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan pendidikan vokasi yang ada di Kabupaten PPU lebih didominasi oleh KK yang tidak selaras dengan kebutuhan DUDI lokal dalam menunjang sektor ekonomi, yaitu kuliner; teknik komputer dan jaringan; desain komunikasi visual; teknik konstruksi dan perumahan dan manajemen perkantoran. Lulusan SMK di Kabupaten PPU ini walaupun saat ini tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, namun diharapkan dapat terserap di kebutuhan tenaga kerja vokasi IKN.

Oleh karena itu, konsep pembangunan IKN menjadi Kota Modern perlu menjadi perhatian pendidikan vokasi di Kabupaten PPU untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agar kompetensi lulusan memenuhi standar kebutuhan tenaga kerja vokasi IKN.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah keempat yang masuk wilayah serambi IKN merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Selain sumberdaya alam, khususnya pertambangan dan penggalian, terdapat empat sektor lain yang mewarnai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sama dengan Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi, dan kebutuhan tenaga vokasi hanya dipenuhi pada tingkat SMK. Konsentrasi keahlian pendidikan vokasi di tingkat SMK memiliki keselarasan dengan sektor industri penggalian; perdagangan besar dan eceran; dan reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan Konsentrasi Keahlian yang mendukung sektor pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan dan perikanan belum tersedia.

Berdasarkan profil keselarasan pendidikan vokasi dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah serambi IKN menunjukkan bahwa jurusan pada pendidikan tinggi di wilayah penyangga IKN masih masih bergantung pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan sebagai kota besar di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, jurusan-jurusan yang ditawarkan pada universitas, politeknik, akademi, dan lembaga pelatihan di kota-kota tersebut dapat dikatakan cukup selaras dengan potensi ekonomi daerah. Terlebih, jurusan-jurusan tersebut merupakan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan IKN, terutama untuk kesehatan dan tehnik. Hal ini menarik untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan khususnya bagi pendidikan vokasi. Dengan keselarasan yang rendah pada level SMK namun keselarasan tinggi pada Pendidikan tinggi, maka dapat dimungkinkan terjadi kekurangan tenaga kerja lapang untuk pekerjaan teknis yang umumnya diisi oleh lulusan SMK. Hal ini terkonfirmasi dari kegiatan FGD bahwa kebutuhan tenaga kerja lapang untuk pembangunan IKN masih bergantung pada tenaga kerja dari luar Kalimantan, khususnya dari pulau Jawa.

Hal ini tidak mengherankan karena profil SMK di Pulau Jawa relatif lebih beragam dan memenuhi kebutuhan program pembangunan IKN seperti bidang teknik bangunan, konstruksi, mesin, dan bidang lain yang relevan. Sedangkan di empat wilayah tersebut, profil pendidikan SMK nya mayoritas di perkantor, TKJ, dan TKR. Akan tetapi, jika diproyeksikan lulusan SMK tersebut melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, maka ketersediaan jurusan yang relevan dengan kebutuhan IKN serta potensi ekonomi daerah sudah banyak tersedia. Bagi pendidikan tinggi, situasi ini dapat dikatakan menguntungkan. Namun bagi pengelola SMK dan Pemerintah Propinsi sebagai otoritas pendidikan vokasi, kondisi ini hendaknya dipertimbangkan.

Jika dilihat dari analisis persebaran akses pendidikan vokasi, pada empat wilayah dapat dikatakan belum merata. Di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan misalnya, lokasi pendidikan vokasi baik itu level SMK, pendidikan tinggi, serta lembaga kursus masih terpusat di pusat kota padahal wilayah lain masih luas.

Meskipun dapat dipahami bahwa wilayah lain merupakan hutan dan pegunungan, tetapi persebaran di sepanjang jalur transportasi juga belum nampak. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan akses fasilitas pendidikan bagi penduduk yang tinggal jauh dari pusat kota sehingga melemahkan minat untuk menempuh pendidikan. Sedangkan di Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara, profil dan sebaran pendidikan vokasi relatif merata meskipun jumlahnya tidak banyak. Keterbatasan akses dan transportasi di wilayah penunjang IKN merupakan hambatan besar bagi siswa dalam mengakses pendidikan. Meskipun sama-sama wilayah yang berdekatan, namun dengan luas wilayah serta geografis yang sulit ditempuh, pemerataan fasilitas pendidikan di empat wilayah penunjang IKN sangat diperlukan. Jika tidak, maka perkembangan pendidikan khususnya vokasi di wilayah tersebut akan selalu tertinggal dibandingkan pulau Jawa. Pembangunan jalan tol di Kalimantan Timur dapat dikatakan sebagai komitmen besar pemerintah dalam peningkatan akses transportasi dan infrastruktur penunjang pembangunan, termasuk pendidikan.

Hal lain yang menarik dari profil pendidikan tinggi vokasi di dua kota adalah jumlah jurusan yang relevan dengan bidang kesehatan, perawat, farmasi, dokter, dan tenaga penunjang kesehatan. Dalam hal ini, ketersediaan jurusan dan tenaga kerja di bidang kesehatan merupakan dukungan penting bagi pembangunan IKN. Meskipun Pengelola IKN telah membatasi jumlah penduduk di IKN, namun dengan kebutuhan layanan kesehatan di IKN, potensi terbukanya lapangan kerja di IKN akan sangat besar dan memberikan peluang kerja bagi lulusan di jurusan-jurusan tersebut, sehingga kebutuhan tenaga kerja di bidang kesehatan tidak harus lagi diambil dari luar provinsi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis keselarasan yang telah dilakukan, terdapat 4 pekerjaan rumah di pendidikan vokasi yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Memperhatikan rencana tahapan pembangunan IKN, saat ini peluang besar untuk lulusan SMK dan Perguruan Tinggi dari jurusan konstruksi;
2. Informasi yang terbuka dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) kepada daerah wilayah Serambi IKN terkait kompetensi lulusan SMK yang dibutuhkan di IKN;
3. Pembukaan Konsentrasi Keahlian di Tingkat SMK dan Program Studi di tingkat Perguruan Tinggi, seyogyanya memperhatikan kebutuhan keahlian lulusan vokasi untuk menunjang IKN sesuai tahapan pembangunan IKN;
4. Pendidikan vokasi yang sudah ada perlu meningkatkan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan IKN sebagai Kota Modern;
5. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan BKK (Bursa Kerja Khusus) untuk peningkatan keterserapan lulusan SMK ke dalam Mitra Industri.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2017). Metode Perhitungan PDRB Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Dirjen Vokasi (2023). Pendidikan Vokasi Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi. <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/pendidikan-vokasi-sebagai-akselerator-pertumbuhan-ekonomi>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kemendikbud.

Puckett, Davidson, Lee (2012). "Vocational Education: The Missing Link in Economic Development." The Boston Consulting Group. Accessed June 16, 2024.

Siswanto, A., & Widyastuti, T. (2018). Peningkatan Kualitas *Output* SMK Melalui Program Magang Berbasis Sekolah di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 201-212.



**ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI
TERHADAP POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN
BATANG**

ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI TERHADAP POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN BATANG

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dwi Ferati Astuti

Pengadministrasi Perkantoran di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.

Lektor Kepala Jurusan S2 Manajemen di Universitas Brawijaya

Radityo Putro Handrito, S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Kewirausahaan di Universitas Brawijaya

Tufiq Ismail, S.S., S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Dr. Christin Susilowati, S.E., M.Si.

Lektor Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Nugroho Suryo Bintoro, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.

Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Prasetya Putra Dewanta, SE., M.Buss.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Muhammad Faathir

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Renata Damayanti, SE

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Anindita Ajeng Prililantyas, SE.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keselarasan pendidikan vokasi dengan potensi ekonomi daerah tidak hanya menjadi salah satu parameter penting atas keberhasilan kurikulum institusi pendidikan tetapi juga menjadi sebuah parameter potensi perkembangan kualitas SDM dan proyeksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Ketersediaan lapangan kerja dan pasokan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan DUDI menjamin perkembangan perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan hasil kajian data sekunder dan kunjungan lapang, tim kajian menyimpulkan bahwa tingkat keselarasan pendidikan vokasi terhadap potensi ekonomi daerah adalah parameter yang tidak dapat diusahakan secara sektoral, melainkan harus berkesinambungan dan berkolaborasi antara pemangku

kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dengan pihak swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Di wilayah Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP) di Kabupaten Batang terjadi pertumbuhan yang signifikan di sektor pengolahan yaitu tekstil/garmen, furnitur, otomotif, elektronik farmasi dan alat kesehatan. Sejalan dengan bertumbuhnya industri tersebut, terjadi peningkatan di sektor-sektor lain yang menjadi rantai pasok dari industri tersebut, antara lain industri logistik, packaging, jasa desain dan konstruksi. Selain itu tumbuh juga industri pariwisata sebagai turunan dari pertumbuhan industri di KITB dan BIP.

Terkait kebutuhan tenaga kerja seperti juga yang terjadi di Kabupaten Batang, pemangku kepentingan telah bekerja sama dengan industri mengadakan pelatihan yang selanjutnya tenaga terlatih yang sebagian besar juga berpendidikan umum seperti SMA direkrut menjadi tenaga kerja dengan keahlian yang sudah sesuai kebutuhan perusahaan. Hal ini dalam jangka panjang akan menjadi ancaman untuk lulusan SMK. Pada sudut pandang yang berbeda, situasi ini dapat dipahami karena kurang siapnya mental bekerja dari lulusan SMK dan manfaat yang diambil oleh industri yaitu dapat memperoleh tenaga kerja dengan biaya yang lebih murah.

Kata kunci: KITB, BIP Vokasi

PENDAHULUAN

Tujuan utama institusi pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembelajaran, tetapi juga untuk mempersiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi, kesiapan, dan keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional (Kemendikbud, 2019). Tujuan ini memiliki dampak signifikan bagi para pemangku kepentingan, seperti institusi pendidikan, orang tua, siswa, dan DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018). Oleh karena itu, keselarasan kompetensi peserta didik serta lulusan terhadap kebutuhan DUDI menjadi parameter penting terhadap efektivitas pembelajaran.

Institusi pendidikan vokasi tidak hanya diharapkan dapat menerapkan kurikulum dan melaksanakan proses pembelajaran, namun juga menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan dapat diterima oleh DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018; Kementerian Ketenagakerjaan, 2019). Seiring dengan berkembangnya kebutuhan DUDI, pendidikan vokasi juga harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan DUDI, baik di tingkat lokal (kota dan kabupaten), regional (provinsi), nasional, maupun internasional. Pendidikan vokasi di Indonesia mencakup pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan),

Politeknik, Akademi, Institut, dan Lembaga Pelatihan dan Kursus. Berbagai jenjang dan program vokasional tersebut disediakan oleh pemerintah maupun swasta sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja dan memenuhi standar DUDI.

Berbagai konsentrasi keahlian dan pelatihan yang ditawarkan ternyata belum optimal dalam mengatasi tantangan kebutuhan DUDI. Terbukti dengan masih tingginya jumlah pengangguran dari pendidikan vokasi, rendahnya keselarasan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja, dan rendahnya keberlanjutan lulusan SMK pada jenjang pendidikan tinggi (Maulina & Yoenanto, 2022). Selain itu, tingkat kelanjutan lulusan SMK ke jenjang pendidikan tinggi juga menjadi perhatian serius (Tim Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2020). Fenomena ini bahkan semakin buruk ketika terjadi pada provinsi di luar Pulau Jawa. Menghadapi kondisi tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat lokal, regional, dan nasional telah memberikan perhatian untuk merumuskan solusi atas permasalahan tersebut. Meskipun berbagai analisis dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, optimalisasi kebijakan belum berjalan merata terutama di daerah atau provinsi di luar Pulau Jawa. Salah satu penyebab yang diduga terlupakan dalam analisis keselarasan adalah faktor penawaran dan permintaan pasar

tenaga kerja serta potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, permintaan tenaga kerja oleh DUDI terus bertambah seiring bertumbuhnya perekonomian nasional. Selain itu, angkatan kerja yang semakin banyak (bonus demografi) membuat persaingan kerja juga semakin meningkat.

Analisis deskripsi kualitatif digunakan untuk melihat karakter dominan, sebaran dimensi, anomali data, dan perbandingan kualitas dan karakteristik pendidikan vokasi di Kabupaten Batang dalam upaya mendukung potensi wilayah. Analisis spektrum warna merupakan analisis visual dengan bantuan warna untuk melihat keselarasan antara potensi ekonomi wilayah. Analisis spektrum warna dan kajian geografis sebagai penunjang analisis dan penyajian data, kajian ini juga dilengkapi dengan analisis geografis menggunakan ArcGIS agar dapat membantu visualisasi dan pemetaan wilayah berdasarkan potensi wilayah dan profil pendidikan vokasi. Dalam kajian ini, data PDRB sektoral di setiap wilayah dipilih menjadi indikator utama dalam keselarasan terhadap profil pendidikan vokasi di wilayah tersebut. Keselarasan antara profil pendidikan vokasi terhadap profil ekonomi daerah menunjukkan ketersediaan tenaga kerja pada industri yang paling berkembang di suatu wilayah.

DESKRIPSI MASALAH

Kabupaten Batang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan daerah. Perekonomian Kabupaten Batang didominasi oleh sektor pengolahan. Hal ini sesuai dengan kondisi Kabupaten Batang yang memiliki banyak industri pengolahan yang tersebar di berbagai wilayahnya. Keberadaan sektor industri baik besar, menengah dan kecil menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Batang. Selanjutnya, sektor pertanian menjadi sektor terbesar kedua dalam kontribusi pada pendapatan daerah dan menjadi penopang kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Batang. Sektor lain dengan kontribusi terbesar juga diberikan oleh sektor perdagangan, konstruksi dan jasa pendidikan. Sektor pengolahan menjadi tulang punggung perekonomian karena tidak hanya kontribusi pada pendapatan tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk wilayah Kabupaten Kendal. Kondisi yang berbeda ditemui di sektor pertanian yang sudah semakin sulit untuk mendapatkan tenaga kerja.

Profil pendidikan vokasi di tingkat SMK pada Kabupaten Batang memperlihatkan kesesuaian dengan kebutuhan industri. Mayoritas Kompetensi Keahlian (KK) yang ditawarkan mencakup bidang akuntansi, teknik kendaraan ringan,

teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, serta teknik audio video. KK dari pendidikan vokasi di tingkat SMK sangat sesuai dengan industri yang ada di Kabupaten Batang. Hal ini menunjukkan bahwa industri di Kabupaten Batang, termasuk sektor pengolahan dan otomotif, akan memiliki pasokan tenaga kerja yang memadai untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri tersebut.

Focus group discussion (FGD) dilakukan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang sudah dianalisa dan untuk mendapatkan data primer terkait dengan perkembangan wilayah dan pendidikan vokasi setingkat SMK. Berdasarkan diskusi, disimpulkan bahwa Kabupaten Batang merupakan Kabupaten dengan pendapatan utama daerahnya berasal dari sektor industri pengolahan.

Peluang yang ada pada sektor peternakan saat ini juga didukung dengan adanya pengembangan Desa yang berbasis peternakan seperti Desa Reban dan Desa Semampir sekaligus didukung dengan integrasi dari kawasan Batang Industrial Park (BIP). Kerjasama cukup baik sudah dilakukan dengan industri dalam rangka peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

Pengembangan sektor pariwisata didorong oleh sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Batang, garis pantai sepanjang 37 kilometer. Letak geografis laut dan pegunungan yang dimiliki memunculkan peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata daerah. Obyek wisata buatan lain yang ada di Kabupaten Batang yaitu Taman Safari dikenal dengan Safari Beach Batang yang merupakan taman safari nomor 4 di Indonesia. Local wisdom yang dimiliki oleh Kabupaten Batang menjadi salah

satu alasan Kabupaten Batang menerima ADWI (Anugerah Desa Wisata) yaitu penghargaan terkait program pembangunan Desa dan pengelolaan Desa Wisata yang berkelanjutan. Terdapat desa wisata sebagai obyek wisata budaya yaitu Desa Besani/Desa Adat di Dataran Tinggi Batang. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata untuk meningkatkan PAD, pemerintah secara bersinergi bergerak untuk mengelola seluruh PokDarWis untuk memajukan sektor pariwisata.

REKOMENDASI

Kontribusi sektor pariwisata pada PAD Kabupaten Batang sebesar Rp. 4,7 Milyar dengan anggaran sebesar 0.7% dari 1.47 Triliun Rupiah dari APBD. Berharap angka ini semakin meningkat di tengah beberapa kendala terkait masalah perizinan dalam membuka tempat wisata dengan *online submission access*, BPTSS yang terkait zona juga belum disetujui. Hal ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian pengembangan sektor pariwisata. Uraian rekomendasi pendahulu terkait kebijakan ini untuk memberikan acuan lanjutan arah perkembangan ke depan terkait dengan fokus Kabupaten Batang untuk mengembangkan KITB dan BIP yang didukung oleh sektor pariwisata dan turunannya. Selanjutnya, terkait pendidikan vokasi, berikut rekomendasi yang perlu ditelaah bersama:

1. Sektor pariwisata yang mulai menunjukkan peningkatan seharusnya mendapat respon dari vokasi tingkat SMK sebagai salah satu pemasok tenaga kerja. Namun, masih sangat terbatas SMK di Kabupaten Batang dengan KK yang sesuai dengan sektor pariwisata dan hanya memiliki dua SMK dengan jurusan tata busana sebagai sektor turunan pariwisata. Dengan kata lain, belum ada KK yang sesuai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Masih terkait dengan sektor turunan sektor pariwisata peluang lapangan kerja yang tersedia Kabupaten Batang adalah lulusan SMK dengan KK tata boga. Situasi ini menjadi catatan penting dalam pengembangan kebijakan vokasi pada level SMK khususnya.

2. Dalam diskusi terkait peran pendidikan dalam pertumbuhan perekonomian daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa kewenangan Dinas ini hanya terbatas pada pendidikan formal seperti PAUD, SD, dan SMP, serta pendidikan non-formal melalui LKP dan PKBM, dimana lulusan dari LKP dan PKBM di Kabupaten Batang juga merupakan penyedia tenaga kerja terampil dan bersertifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Lebih lanjut, program lain dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk memenuhi semua kebutuhan tenaga kerja.
3. Terkait dengan penyiapan sumberdaya manusia, Kabupaten Batang mempunyai kerjasama dengan beberapa universitas dan BRIN sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi lokal, merencanakan pendirian Politeknik Mekatronika. Pendirian Politeknik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dari industri. Persiapan untuk mendirikan politeknik tersebut sudah mencapai tahap yang matang, tetapi hingga saat ini masih menunggu perolehan izin yang diperlukan untuk proses pendiriannya. Bisa jadi dukungan dari Universitas Diponegoro untuk membangun PSDKU (Program Studi Di luar Kampus Utama) juga akan memberikan dukungan positif untuk aspek pasokan sumberdaya manusia yang tumbuh beriringan dengan dua kawasan industri KITB dan BIP beserta sektor pariwisata dan turunannya.

REFERENSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kemendikbud.

OECD (2014), *Tourism and the Creative Economy*, *OECD Studies on Tourism*, *OECD Publishing*, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264207875-en>.

Siswanto, A., & Widyastuti, T. (2018). Peningkatan Kualitas *Output* SMK Melalui Program Magang Berbasis Sekolah di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 201-212.



**ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI
TERHADAP POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN
MOROWALI**

ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI TERHADAP POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN MOROWALI

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.

Lektor Kepala Jurusan S2 Manajemen di Universitas Brawijaya

Radityo Putro Handrito, S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Kewirausahaan di Universitas Brawijaya

Tufiq Ismail, S.S., S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Dr. Christin Susilowati, S.E., M.Si.

Lektor Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Nugroho Suryo Bintoro, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.

Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Prasetya Putra Dewanta, SE., M.Buss.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Muhammad Faathir

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Renata Damayanti, SE

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Anindita Ajeng Prililantyas, SE.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keselarasan pendidikan vokasi dengan potensi ekonomi daerah tidak hanya menjadi salah satu parameter penting atas keberhasilan kurikulum institusi pendidikan tetapi juga menjadi sebuah parameter potensi perkembangan kualitas SDM dan proyeksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Ketersediaan lapangan kerja dan pasokan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan DUDI menjamin perkembangan perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan hasil kajian data sekunder dan kunjungan lapang, tim kajian menyimpulkan bahwa tingkat keselarasan pendidikan vokasi terhadap potensi ekonomi daerah adalah parameter yang tidak dapat diusahakan secara sektoral, melainkan harus berkesinambungan dan berkolaborasi antara pemangku kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dengan pihak swasta baik dalam

negeri maupun luar negeri.

Wilayah pertambangan nikel (Kabupaten Morowali), ditemukan bahwa wilayah strategis tersebut belum sepenuhnya didukung oleh profil pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi ekonomi daerah maupun rencana strategis pemerintah.

Wilayah strategis Kabupaten Morowali, disimpulkan bahwa keselarasan profil pendidikan vokasi terhadap potensi ekonominya masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan potensi ekonomi di sektor pengolahan dan sektor pertambangan-penggalan, namun mayoritas KK dan siswa SMK justru menempuh pendidikan yang kurang relevan, misalnya di Teknik Komputer dan Jaringan. Di samping itu, bertumbuhnya industri ikutan seperti konstruksi, akomodasi, dan hiburan juga belum diikuti oleh ketersediaan pendidikan vokasi.

Kata Kunci: morowali, nikel, vokasi

PENDAHULUAN

Tujuan utama institusi pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembelajaran, tetapi juga untuk mempersiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi, kesiapan, dan keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional (Kemendikbud, 2019).

Tujuan ini memiliki dampak signifikan bagi para pemangku kepentingan, seperti institusi pendidikan, orang tua, siswa, dan DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018). Oleh karena itu, keselarasan kompetensi peserta didik serta lulusan terhadap kebutuhan DUDI menjadi parameter penting terhadap efektivitas pembelajaran.

Institusi pendidikan vokasi tidak hanya diharapkan dapat menerapkan kurikulum dan melaksanakan proses pembelajaran, namun juga menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan dapat diterima oleh DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018; Kementerian Ketenagakerjaan, 2019). Seiring dengan berkembangnya kebutuhan DUDI, pendidikan vokasi juga harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan DUDI, baik di tingkat lokal (kota dan kabupaten), regional (provinsi), nasional, maupun internasional. Pendidikan vokasi di Indonesia mencakup pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Politeknik, Akademi, Institut, dan Lembaga Pelatihan dan Kursus. Berbagai jenjang dan program vokasional tersebut disediakan oleh pemerintah maupun swasta sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja dan memenuhi standar DUDI.

Berbagai konsentrasi keahlian dan pelatihan yang ditawarkan ternyata belum optimal dalam mengatasi tantangan kebutuhan DUDI.

Terbukti dengan masih tingginya jumlah pengangguran dari pendidikan vokasi, rendahnya keselarasan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja, dan rendahnya keberlanjutan lulusan SMK pada jenjang pendidikan tinggi (Maulina & Yoenanto, 2022). Selain itu, tingkat kelanjutan lulusan SMK ke jenjang pendidikan tinggi juga menjadi perhatian serius (Tim Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2020). Fenomena ini bahkan semakin buruk ketika terjadi pada provinsi di luar Pulau Jawa. Menghadapi kondisi tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat lokal, regional, dan nasional telah memberikan perhatian untuk merumuskan solusi atas permasalahan tersebut. Meskipun berbagai analisis dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, optimalisasi kebijakan belum berjalan merata terutama di daerah atau provinsi di luar Pulau Jawa. Salah satu penyebab yang diduga terlupakan dalam analisis keselarasan adalah faktor penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja serta potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, permintaan tenaga kerja oleh DUDI terus bertambah seiring bertumbuhnya perekonomian nasional. Selain itu, angkatan kerja yang semakin banyak (bonus demografi) membuat persaingan kerja juga semakin meningkat.

Oleh karena itu, analisis deskripsi kualitatif digunakan untuk melihat karakter dominan, sebaran dimensi, anomali data, dan perbandingan kualitas dan karakteristik pendidikan vokasi di Kabupaten Morowali dalam upaya mendukung potensi wilayah. Analisis spektrum warna merupakan analisis visual dengan bantuan warna untuk melihat keselarasan antara potensi ekonomi wilayah.

Analisis spektrum warna dan kajian geografis sebagai penunjang analisis dan penyajian data, kajian ini juga dilengkapi dengan analisis geografis menggunakan ArcGIS agar dapat membantu visualisasi dan pemetaan wilayah berdasarkan potensi wilayah dan profil pendidikan vokasi. Dalam kajian ini, data PDRB sektoral di setiap wilayah dipilih menjadi indikator utama dalam keselarasan terhadap profil pendidikan vokasi di wilayah tersebut. Keselarasan antara profil pendidikan vokasi terhadap profil ekonomi daerah menunjukkan ketersediaan tenaga kerja pada industri yang paling berkembang di suatu wilayah.

DESKRIPSI MASALAH

Kabupaten Morowali merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi tengah yang dilakukan pada tahun 1999. Perekonomian Kabupaten Morowali mayoritas digerakkan oleh sektor pengolahan terutama untuk komoditas turunan dari barang tambang seperti nikel, besi, batu

bara, dan emas. Sektor pertambangan di Kabupaten Morowali dimulai sejak awal tahun 2000 dan semakin berkembang dalam 5 tahun terakhir karena meningkatnya permintaan nikel untuk industri elektronik.

Akan tetapi, profil pendidikan vokasi di Kabupaten Morowali dinilai belum selaras dengan profil ekonomi daerahnya karena mayoritas KK SMK justru membuka jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Sedangkan jurusan yang relevan dengan pertambangan dan potensi pertanian dan perikanan semakin tidak diminati oleh siswa. Peralihan minat siswa ke sekolah jurusan pertambangan merupakan konsekuensi logis atas meningkatnya potensi ekonomi pertambangan apalagi setelah investasi asing masuk untuk pertambangan nikel. Akan tetapi, karena jumlah KK di bidang TKJ maka pasokan tenaga kerja terlatih di bidang pertambangan untuk industri di Kabupaten Morowali juga terbatas.

Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Morowali mengatakan bahwa mayoritas tenaga kerja bidang pertambangan yang bekerja di Kabupaten Morowali masih berasal dari luar wilayah seperti Poso, Palu, Kendari, Makassar, atau bahkan dari Jawa. Hal ini disebabkan karena rendahnya kemampuan tenaga kerja lokal di bidang yang relevan dengan pertambangan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah mengupayakan berbagai program kerjasama dan beasiswa bagi masyarakat lokal. Sejak tahun 2019, telah dimulai program beasiswa di jenjang D1 yang bekerjasama dengan Politeknik Industri Logam Morowali. Pada tahun 2024, kerjasama tersebut telah ditingkatkan pada jenjang D3.

Peningkatan kemampuan di bidang pertambangan dilakukan di jenjang perguruan tinggi karena untuk jenjang SMK, pemerintah daerah mengalami keterbatasan peralatan praktik. Sehingga, kemampuan siswa SMK untuk menguasai praktikum sangat terbatas. Hal ini yang membuat jumlah tenaga kerja terampil di Kabupaten Morowali menjadi terbatas. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali telah menjalin kerjasama dengan pelaku industri untuk memberikan pelatihan singkat bagi para calon tenaga kerja yang belum memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Akan tetapi, karena budaya pertambangan berbeda dengan budaya yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, maka program tersebut kurang diminati. Pada akhirnya, hal ini lah yang menyebabkan perusahaan lebih memilih tenaga kerja terlatih dari luar Kabupaten Morowali.

Hal yang sama juga terjadi di industri non-pertambangan. Salah satu industri yang berkembang karena sektor pertambangan adalah industri perhotelan, hiburan, dan konstruksi. Meningkatnya jumlah hotel yang berdiri di Kabupaten Morowali belum diibangi dengan ketersediaan tenaga

kerja terampil di bidang perhotelan. Akibatnya, tenaga kerja yang menempati lapangan kerja di industri perhotelan diisi oleh lulusan SMA atau lebih rendah. Hal ini membuat kualitas layanan di industri perhotelan belum optimal. Begitu pula yang terjadi di industri hiburan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis, munculnya investasi asing di Kabupaten Morowali menggerakkan ekonomi lokal dan membutuhkan tenaga kerja terampil untuk mengisi berbagai lapangan kerja. Namun, karena kendala Bahasa dan keterampilan tenaga kerja yang ada, perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar. Fenomena ini merupakan sebuah peluang bagi lembaga kursus dan pelatihan untuk menghadirkan pelatihan keterampilan lain yang relevan dengan kondisi saat ini seperti pelatihan bahasa asing, pelatihan tata boga, pelatihan tata busana, dan pelatihan kriya yang mampu memberi nilai tambah bagi pasar.

Terlepas dari industri pertambangan. Kepala Sub Bagian Industri Dinas Perindustrian mengatakan bahwa ada potensi komoditas dan produk olahan kayu di Kabupaten Morowali. Akan tetapi, akses kualitas produk yang masih rendah menjadi kendala untuk bersaing dengan produk luar daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterampilan pengrajin kayu dan mebel di Kabupaten Morowali. Industri pengolahan kayu tumbuh secara turun temurun dan keterampilannya diajarkan secara otodidak tanpa ada bekal pelatihan pada ilmu terkini dan peralatan modern. Dengan potensi yang besar, pemerintah berharap ada skema kursus bagi para pengrajin kayu dengan pendidikan non-formal dan bekerjasama dengan industri kayu terkemuka seperti di Kabupaten Jepara Jawa Tengah.

Pengembangan wilayah strategis nasional dan sektor strategis untuk menuju Indonesia Emas harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan dikerjakan bersama-sama lintas sektoral. Pendidikan vokasi, sebagai sebuah institusi pencetak tenaga berpendidikan dan siap kerja, memiliki peran penting dalam mendukung tujuan strategi nasional. Akan tetapi, dengan masih rendahnya keselarasan profil pendidikan vokasi dengan potensi ekonomi daerah, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keselarasan dan mengupayakan program-program untuk meningkatkan keselarasan tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan masih banyak pekerjaan rumah di pendidikan vokasi yang harus diselesaikan. Penyelarasan profil pendidikan vokasi terhadap kebutuhan DUDI dan sektor ekonomi daerah merupakan isu penting dalam pembangunan Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Morowali. Peran pemerintah daerah di propinsi maupun kota / kabupaten dalam menentukan KK SMK serta jurusan di perguruan tinggi menjadi sangat krusial.

REFERENSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kemendikbud.

Siswanto, A., & Widyastuti, T. (2018). Peningkatan Kualitas *Output* SMK Melalui Program Magang Berbasis Sekolah di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 201-212.

Maulina, M., & Yoenanto, N. H. (2022). Optimalisasi link and match sebagai upaya relevansi SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 28-37. doi: <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.48008>.



**ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI
TERHADAP POTENSI EKONOMI KABUPATEN
KENDAL**

ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI TERHADAP POTENSI EKONOMI KABUPATEN KENDAL

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.

Lektor Kepala Jurusan S2 Manajemen di Universitas Brawijaya

Radityo Putro Handrito, S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Kewirausahaan di Universitas Brawijaya

Tufiq Ismail, S.S., S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Dr. Christin Susilowati, S.E., M.Si.

Lektor Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Nugroho Suryo Bintoro, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.

Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Prasetya Putra Dewanta, SE., M.Buss.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Muhammad Faathir

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Renata Damayanti, SE

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Anindita Ajeng Prililantyas, SE.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penggerak aktivitas ekonomi suatu negara, dengan peran pentingnya dalam mengelola faktor produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Keterserapan tenaga kerja oleh sektor perekonomian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pendirian KEK dengan beragam fasilitas dan kemudahannya yang dikembangkan mempunyai tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Lebih lanjut, KEK juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Dirikannya Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal memiliki dampak pada pertumbuhan yang signifikan di sektor pengolahan antara lain tekstil, furnitur, otomotif, elektronik farmasi dan alat kesehatan.

Sejalan dengan bertumbuhnya industri tersebut, terjadi peningkatan di sektor-sektor lain yang menjadi rantai pasok dari industri pengolahan, antara lain industri logistik, *packaging*, jasa desain dan konstruksi. Selain itu tumbuh juga industri pariwisata sebagai pemenuhan kebutuhan dari pertumbuhan industri di KIK dan KEK. *Hospitality Industry* berkembang seiring bertumbuhnya sektor industri antara lain hotel, restoran, transportasi, dan industri hiburan. Industri lain yang juga mulai bertumbuh adalah sektor garmen dan busana, yang memunculkan peluang baru dan membutuhkan pasokan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri ini.

Perkembangan sektor industri yang baru yang ada, memerlukan pemenuhan sumberdaya manusia baik dari kualitas maupun kuantitas. Kebijakan terkait penyiapan kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri perlu diambil. Kebijakan yang mendorong penyiapan kompetensi ini dapat melalui pengembangan program studi dan lembaga pelatihan yang dapat menciptakan kompetensi yang dibutuhkan industri. Usaha pencapaian keselarasan baru ini dapat tercapai secara optimal dengan sinergi yang baik antar stakeholder.

Perlu usaha untuk mempertegas peran dari masing-masing stakeholder sehingga bisa lebih optimal memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan industri, keterserapan tenaga kerja, yang akhirnya akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Potensi ekonomi, *industry, hospitality*

PENDAHULUAN

Tujuan utama institusi pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembelajaran, tetapi juga untuk mempersiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi, kesiapan, dan keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional (Kemendikbud, 2019). Tujuan ini memiliki dampak signifikan bagi para pemangku kepentingan, seperti institusi pendidikan, orang tua, siswa, dan DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018). Oleh karena itu, keselarasan kompetensi peserta didik serta lulusan terhadap kebutuhan DUDI menjadi parameter penting terhadap efektivitas pembelajaran. Namun, masalah klasik dunia pendidikan terkait serapan tenaga kerja pada DUDI masih menjadi tantangan berat bagi institusi pendidikan, tidak terkecuali bagi pendidikan vokasi.

Pada jenjang SMK, pemerintah telah menawarkan 128 konsentrasi keahlian (KK) (Kemendikbud, 2020; Dapodik 2022) yang dapat dipilih oleh siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam menghadapi dunia kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi (D1, D2, D3, dan D4), pemerintah telah mendirikan Politeknik, Akademi, dan Institut dengan berbagai macam penjurusan dan keterampilan. Sedangkan bagi pendidikan non-gelar, pemerintah mengizinkan pendirian lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang memberikan pelatihan khusus pada keterampilan tertentu. Namun, berbagai konsentrasi keahlian dan pelatihan yang ditawarkan ternyata belum optimal dalam mengatasi tantangan kebutuhan DUDI. Salah satu penyebab yang diduga terlupakan dalam analisis keselarasan adalah faktor penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja serta potensi ekonomi daerah. Sementara itu, permintaan tenaga kerja oleh DUDI terus bertambah seiring bertumbuhnya perekonomian nasional. Selain itu, angkatan kerja yang semakin banyak (bonus demografi) membuat persaingan kerja juga semakin meningkat.

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan daerah. Sebagai

pusat pemerintahan kabupaten, pembangunan di Kabupaten Kendal cukup pesat, begitu pula dengan kepadatan penduduknya yang terus meningkat, yang mempunyai dampak pada peningkatan kebutuhan akan fasilitas umum, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari keberadaan Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal sebagai kawasan yang dikembangkan untuk mendukung investasi industri di Indonesia. KEK ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur di dalam maupun di luar KIK dan dapat memberikan dampak positif tidak hanya skala lokal namun juga skala nasional. KEK Kendal merupakan sektor industri terbesar nomor 12 di Indonesia dan nomor 2 di Jawa Tengah setelah Cilacap.

Dampak yang diharapkan dengan adanya KEK ini antara lain pertumbuhan ekonomi, perkembangan wilayah, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, serta terserapnya tenaga kerja lokal. Lebih lanjut secara lebih spesifik dampak yang ditimbulkan yaitu pertumbuhan nilai investasi pertumbuhan sektor industri, pertumbuhan fasilitas penunjang seperti pembangunan residensial dan pertumbuhan infrastruktur di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan harus didukung oleh kesiapan sumberdaya manusia dengan kapasitas yang sangat baik dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

DESKRIPSI MASALAH

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan daerah. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pembangunan di Kabupaten Kendal cukup pesat. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kendal, sebagaimana terlihat dari data PDRB 2018-2022, didominasi oleh sektor pengolahan. Hal ini sejalan dengan adanya banyak industri pengolahan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kendal. Industri pabrik, industri kecil, dan menengah menjadi motor utama dalam perekonomian kabupaten ini. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor terbesar kedua karena mendukung kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Kendal. Kekuatan ekonomi di sektor pengolahan tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Berdasarkan profil pendidikan vokasi di tingkat SMK, Kabupaten Kendal menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan industri lokal.

Kompetensi Keahlian (KK) utama dalam Kurikulum Merdeka di Kabupaten Kendal meliputi teknik kendaraan ringan, desain dan produksi busana, teknik sepeda motor, rekayasa perangkat lunak, dan teknik komputer dan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal berusaha menyediakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri setempat. Dengan demikian, Kabupaten Kendal dapat memastikan bahwa para lulusan SMK memiliki keterampilan yang relevan dan siap untuk berkontribusi dalam industri lokal, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun, pada jenjang pendidikan tinggi, Kabupaten Kendal belum dapat memberikan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan wilayah. Pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri juga dilakukan melalui mengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang ada dalam kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, yang didominasi kompetensi sektor garmen dan mensupply kebutuhan tenaga kerja pada sektor ini. Lebih lanjut, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian juga mempunyai program pelatihan bekerjasama dengan industri untuk memenuhi kebutuhan perekrutan karyawan dalam industri.

Pelatihan yang dilakukan merupakan salah satu alternatif menjembatani ketidakselarasan antara kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Tengah dengan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan munculnya peluang sektor baru. KEK Kendal merupakan sektor industri terbesar nomor 12 di Indonesia dan nomor 2 di Jawa Tengah setelah Cilacap. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) mencatat jenis investasi di KEK meliputi industri substitusi impor, seperti tekstil dan busana, furniture, mainan, otomotif, elektronik, dan lainnya. Berkembang juga industri yang berorientasi ekspor dan logistik berbasis 4.0 seperti integrated smart port. Selain itu, terdapat kegiatan utama di Kawasan Industri Kendal (KIK), seperti industri mainan, sepatu, packaging, peralatan medis, bahan bangunan, farmasi, pergudangan, industri karet, plastik, dan serat sintetis.

Peningkatan ekonomi di Kabupaten Kendal utamanya digerakkan oleh sektor industri dan selanjutnya memunculkan rangkaian industri turunan sebagai rantai pasok dari aktivitas industri yang ada. Pertumbuhan industri yang signifikan terjadi di sektor pengolahan yaitu tekstil, furniture, otomotif, elektronik farmasi dan alat kesehatan.

Sejalan dengan bertumbuhnya industri tersebut terjadi peningkatan di sektor-sektor lain yang menjadi supply chain dari industri tersebut, antara lain industri logistik, packaging, jasa desain dan konstruksi. Selain itu tumbuh juga industri pariwisata sebagai turunan dari pertumbuhan industri di KEK. Sektor pariwisata yang menunjukkan peningkatan yaitu hospitality industry antara lain hotel, restoran, transportasi dan industri hiburan. Industri lain yang mulai bergerak adalah sektor tekstil, garmen dan busana, yang memunculkan peluang baru dan membutuhkan pasokan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri ini. Tumbuh dan meningkatnya sektor-sektor yang ada dampak dari intensifikasi maupun ekstensifikasi industri membutuhkan pasokan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kegiatan industri yang berkembang. Kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh semua stakeholder yang terkait. Kebijakan terbaik perlu diambil supaya pertumbuhan industri yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal.

REKOMENDASI

1. Pertumbuhan industri sangat berhubungan dengan kesiapan sumberdaya manusia, keselarasan antara kebutuhan dan kompetensi yang tersedia. Sinergi yang baik antar stakeholder sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan penyediaan kompetensi sesuai pertumbuhan industri. Koordinasi terkait peluang yang ada di industri, kebutuhan kompetensi, masalah-masalah yang muncul terkait tenaga kerja dapat ditingkatkan.
2. Penegasan peran masing-masing stakeholder dengan kewenangan yang dimiliki perlu dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam usaha peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pemenuhan tenaga kerja serta kompetensi sesuai kebutuhan industri.
3. Kebutuhan pada kebijakan yang berorientasi pada ketersediaan kompetensi yang dibutuhkan oleh peningkatan industri yang ada, dan industri baru yang sedang tumbuh antara lain ; kompetensi pada *hospitality industry, logistic*, tekstil, garmen dan busana. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pendirian Program Studi serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
4. Peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di daerah supaya dapat bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga tidak terjadi imigrasi tenaga kerja dari daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan industri. Lebih lanjut bila pemenuhan tenaga kerja dan kompetensi bisa disediakan oleh daerah maka implikasi terhadap peningkatan perekonomian daerah menjadi lebih optimal.

REFERENSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kemendikbud.

Rachman, R., Fitriyani, Y., & Sari, D. P. (2020). Pengembangan Program Kewirausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(1), 67-78.

Siswanto, A., & Widyastuti, T. (2018). Peningkatan Kualitas *Output* SMK Melalui Program Magang Berbasis Sekolah di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 201-212.

Suherman, A., & Alfi, S. (2020). Pendidikan Kejuruan di Era Revolusi Industri 4.0: Teori dan Praktik. PT. Raja Grafindo Persada



**ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN TINGGI
VOKASI TERHADAP POTENSI WILAYAH DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

ANALISIS KESELARASAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI TERHADAP POTENSI WILAYAH DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

TIM PENULIS

Dr. Sulistio Mukti Cahyono, M.B.A.

Koordinator Pokja Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.

Lektor Kepala Jurusan S2 Manajemen di Universitas Brawijaya

Radityo Putro Handrito, S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Kewirausahaan di Universitas Brawijaya

Tufiq Ismail, S.S., S.E., M.M., Ph.D.

Asisten Ahli Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Dr. Christin Susilowati, S.E., M.Si.

Lektor Jurusan S1 Manajemen di Universitas Brawijaya

Nugroho Suryo Bintoro, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.

Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Prasetya Putra Dewanta, SE., M.Buss.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Muhammad Faathir

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Renata Damayanti, SE

Tim Ahli Universitas Brawijaya

Anindita Ajeng Prililantyas, SE.

Tim Ahli Universitas Brawijaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keselarasn KEK Morotai (Kabupaten Pulau Morotai) terhadap profil pendidikan vokasinya dikonfirmasi pada level menengah dan cenderung rendah. Meskipun memiliki bekal geografis yang luar biasa untuk industri pariwisata, potensi tersebut belum tercermin pada profil pendidikan vokasi di Kabupaten Pulau Morotai maupun Provinsi Maluku Utara secara umum. Dengan potensi pariwisata yang besar, profil pendidikan vokasi justru didominasi oleh jurusan teknik komputer jaringan. Sedangkan jurusan yang memiliki relevansi tinggi dengan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif tidak banyak diminati dan belum disediakan oleh pemerintah. Faktor budaya, dampak pandemi, ketersediaan akses transportasi, serta peralihan kepemimpinan daerah yang tidak berkesinambungan merupakan masalah utama yang harus dicarikan solusi agar keselarasan

pendidikan vokasi di KEK Morotai semakin meningkat. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai merupakan kasus yang dapat dijadikan pelajaran agar tidak terjadi lagi di daerah lain yang mengandalkan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif dalam kegiatan ekonominya.

PENDAHULUAN

Tujuan utama institusi pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembelajaran, tetapi juga untuk mempersiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi, kesiapan, dan keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional (Kemendikbud, 2019). Tujuan ini memiliki dampak signifikan bagi para pemangku kepentingan, seperti institusi pendidikan, orang tua, siswa, dan DUDI (Siswanto & Widyastuti, 2018). Pendidikan vokasi di Indonesia mencakup pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Politeknik, Akademi, Institut, dan Lembaga Pelatihan dan Kursus. Berbagai jenjang dan program vokasional tersebut disediakan oleh pemerintah maupun swasta sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja dan memenuhi standar DUDI.

Pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk sektor-sektor yang penting untuk perkembangan ekonomi suatu negara.

Industri pariwisata berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian dengan cara menciptakan lapangan kerja, mendatangkan investasi, memberikan nilai tambah pada komoditas, bahkan mendatangkan devisa bagi sebuah negara. Sebelum pandemi, dalam kurun waktu 2014-2019, OECD menunjukkan bahwa pariwisata internasional menghasilkan lebih dari 8,9 triliun USD pada perekonomian dunia. Ekonomi kreatif juga menggerakkan pertukaran budaya dengan memberikan ruang bagi seniman dan kreator untuk berbagi karyanya di tingkat global, mempertahankan budaya dan pertukaran budaya. Secara umum, industri pariwisata dan ekonomi kreatif adalah komponen-komponen yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara, berkontribusi terhadap PDB, pengangguran, pertahankan budaya, inovasi, dan keberlanjutan. Dengan potensi yang demikian besar, tidak heran jika pemerintah Indonesia menetapkan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas dalam pembangunan di masa depan.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara dan terbentuk pada tahun 2008. Menurut data tahun 2022, Kabupaten Pulau Morotai memiliki wilayah seluas 2.335 km persegi dengan penduduk sejumlah 74.565 jiwa yang tersebar di lima kecamatan.

Potensi ekonomi Kabupaten Pulau Morotai ada pada hasil pertanian dan kehutanan untuk produk kayu serta hasil perikanan yang didapat dari wilayah kepulauan sekitarnya. Untuk mendukung roda ekonomi, sektor perdagangan dan konstruksi juga memiliki porsi yang signifikan. Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mulai mengenalkan Kabupaten Pulau Morotai dengan kegiatan Sail Morotai yang melibatkan kerjasama internasional. Kegiatan Sail Morotai juga merupakan upaya promosi pariwisata untuk mengangkat potensi Indonesia bagian timur. Sejak saat itu, Kabupaten Pulau Morotai dan wilayah Halmahera tergabung dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan fokus pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan rencana strategis tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah berupaya membangun infrastruktur dan fasilitas penunjang pengembangan pariwisata; transportasi, jalan raya, gedung, energi, dan pendidikan. Akan tetapi, pandemi Covid-19 membuat pengembangan tersebut terhenti hingga tahun 2024.

Analisis deskripsi kualitatif digunakan untuk melihat karakter dominan, sebaran dimensi, anomali data, dan perbandingan kualitas dan karakteristik pendidikan vokasi di Kabupaten Pulau Morotai dalam upaya mendukung potensi wilayah. Analisis spektrum warna merupakan

analisis visual dengan bantuan warna untuk melihat keselarasan antara potensi ekonomi wilayah. Analisis spektrum warna dan kajian geografis sebagai penunjang analisis dan penyajian data, kajian ini juga dilengkapi dengan analisis geografis menggunakan ArcGIS agar dapat membantu visualisasi dan pemetaan wilayah berdasarkan potensi wilayah dan profil pendidikan vokasi. Dalam kajian ini, data PDRB sektoral di setiap wilayah dipilih menjadi indikator utama dalam keselarasan terhadap profil pendidikan vokasi di wilayah tersebut. Keselarasan antara profil pendidikan vokasi terhadap profil ekonomi daerah menunjukkan ketersediaan tenaga kerja pada industri yang paling berkembang di suatu wilayah.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan profil potensi ekonomi dan profil pendidikan vokasi, keselarasan di Kabupaten Pulau Morotai dapat dikatakan rendah. Dilihat dari PDRB mayoritas yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, profil KK SMK justru didominasi oleh Teknik Komputer dan Jaringan dan Usaha Layanan Wisata. Sedangkan KK Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura berada di urutan ketiga. Meskipun jika dilihat dari rencana pengembangan sektor pariwisata dapat dikatakan bahwa keselarasan sedang, namun potensi ekonomi yang besar masih belum didukung kuat oleh profil KK SMK nya.

Pun pada KK SMK Usaha layanan wisata, jumlah siswanya masih tertinggal dibandingkan dengan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk perguruan tinggi, hanya tersedia satu universitas; Universitas Pasifik, namun tidak menyediakan jurusan yang relevan dengan pendidikan vokasi.

Situasi tersebut dapat dimaklumi karena sejak terjadi pandemi, potensi ekonomi di sektor pariwisata cenderung turun sehingga minat siswa untuk mendalami ilmu kepariwisataan juga menurun. Akibatnya, tenaga kerja sektor pariwisata di Pulau Morotai diisi oleh lulusan SMA dengan segala keterbatasannya. Selain itu, rendahnya minat siswa untuk menempuh pendidikan di bidang pariwisata juga karena faktor budaya. Mayoritas orang tua masih menganggap pekerjaan di sektor pariwisata tidak menjanjikan dan

memiliki konotasi negatif serta dipandang rendah di mata Masyarakat. Oleh karena itu, lulusan di bidang pariwisata lebih memilih berkarir di luar Kabupaten Pulau Morotai.

Sebelum pandemi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di bidang pariwisata, Pemerintah Daerah telah menjalin kerjasama dengan Politeknik Sahid (Sahid Grup) untuk melakukan penyelarasan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industry perhotelan dengan program magang dan beasiswa pada jejaring yang dimiliki oleh Sahid Grup.

Kerjasama tersebut telah meluluskan 21 orang dan telah diberikan kesempatan untuk magang di Singapura dan Malaysia. Akan tetapi, sejak terjadinya pandemi, program tersebut terpaksa dihentikan.

REKOMENDASI

Dinas Pendidikan mengusulkan agar sekolah vokasi, lembaga kursus, atau Balai Latihan Kerja juga menyediakan pelatihan untuk bidang selain perhotelan namun bidang tersebut masih relevan dengan pariwisata misalnya jurusan tata boga, tata busana, bahasa asing, seni kriya, seni musik, dan profesional diver (penyelam). Keterampilan-keterampilan tersebut diyakini memiliki permintaan tenaga kerja yang tinggi bukan hanya di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, tetapi juga di wilayah sekitar Halmahera. Hal tersebut juga dilatar belakangi bahwa tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pulau Morotai 70% masih merupakan warga lokal. Namun, karena skill mereka yang rendah, maka beberapa lapangan pekerjaan khusus masih harus mengambil dari warga luar pulau khususnya dari Ternate dan Manado. Untuk menjamin berkembangnya industri

pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata menyatakan bahwa perlu adanya komitmen pemerintah pusat dalam memberikan subsidi transportasi udara dari dan ke Pulau Morotai. Berkurangnya frekuensi penerbangan menjadi satu kali dalam seminggu membuat perekonomian kabupaten menjadi menurun dalam empat tahun terakhir.

REFERENSI

Simamora, R. N., & Manurung, B. (2019). Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi: Konsep, Implementasi, dan Evaluasi. PT Penerbit Erlangga.

Siswanto, A., & Widyastuti, T. (2018). Peningkatan Kualitas *Output* SMK Melalui Program Magang Berbasis Sekolah di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 201-212.

Suherman, A., & Alfi, S. (2020). Pendidikan Kejuruan di Era Revolusi Industri 4.0: Teori dan Praktik. PT. Raja Grafindo Persada